

**TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM
PENGEMBANGAN DESA WISATA**

(Studi Kasus : Desa Wisata Kalongan Kec. Ungaran Timur)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Fauziah Noor Rahmani

1906016005

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Fauziah Noor Rahmani

NIM : 1906016005

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata
(Studi Kasus: Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2023

Pembimbing 1



Dr. Rofiq M.Si
NIP. 197303052016011901

SKRIPSI
TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
(Studi Kasus: Desa Kalongan Kec. Ungaran Timur)

Disusun Oleh

Fauziah Noor Rahmani

1906016005

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Muhammad Mahsun, M.A.
Penguji I

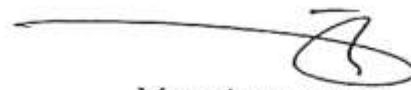
Sekretaris



Drs. Rofiq, M.Si
Penguji II



Muhammad Mahsun, M.A.



Masrohatun, M.Si

Pembimbing



Drs. Rofiq, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Fauziah Noor Rahmani menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur)”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, atau segala kemungkinan lain yang bukan merupakan hasil karya tulis skripsi saya secara otentik untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang. Sumber yang diperoleh merupakan hasil tinjauan Pustaka yang saya lakukan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila terdapat unsur plagiarisme dalam skripsi saya, saya siap menerima konsekuensi yang ada. Terima kasih.

Semarang, 9 Juni 2023

Yang Bertanda Tangan

Fauziah Noor Rahmani

NIM. 1906016005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur)”** dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan Kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M. Ag, selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsun M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Rofiq, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat kedalam penyusunan dan penulisan skripsi penulis.
7. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Agus Basori dan Ibu Istiafah selaku orang tua penulis yang telah mensupport penulis sehingga penulis sampai dititik ini dan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga penulis, Adek Noval, Adek Naila, Mbah Mim, dan Om Udin yang telah

memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

10. Kepala Desa Kalongan dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi.
11. Masyarakat Desa Kalongan serta pengelola Desa Wisata Kalongan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis.
12. Teman-teman penulis yaitu Silfa, Andre, Nabila, Aswin, Anggi, Audy, Lena dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu mensupport sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.

Penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan skripsi terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dari skripsi yang penulis lakukan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatian yang diberikan.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2023

Penulis

Fauziah Noor Rahmani

NIM. 1906016005

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, saya persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tua saya, Bapak Agus Basori dan Ibu Istiafah yang telah berjuang untuk merawat dan mendidik saya dengan tulus dan ikhlas, selalu memberikan doa resti disetiap langkah saya, serta yang paling penting adalah tidak henti-hentinya mensupport saya dalam meraih gelar Sarjana.

Semoga Bapak Ibu diberikan Kesehatan dan keselamatan, umur yang panjang dan barokah, dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Aamiin...

Terimakasih Bapak dan Ibu, atas doa kalian Rahma sudah berada di titik ini, semoga Bapak Ibu panjang umur supaya bisa melihat Rahma sukses, aamiin....

MOTTO

~ *“Untuk menggapai sesuatu harus diperjuangkan terlebih dahulu. Sama halnya saat megambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang sudah masak” ~*

(Mohammad Natsir)

~ *“Jalani segala proses selagi kamu mampu, berhenti sebentar boleh. Tapi jangan pernah berfikir untuk menyerah” ~*

(Fauziah Noor Rahmani)

ABSTRAK

Desa Kalongan merupakan desa yang memiliki potensi alam dan wisata yang unggul, Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan memajukan desa, pemerintah Desa Kalongan mempunyai wacana untuk menjadikan Desa Kalongan sebagai Desa Wisata. Pemerintah Desa Kalongan dalam mengembangkan desa wisata membutuhkan kerja sama dengan *stakeholder*. Tanpa adanya *stakeholder*, pengelolaan desa wisata tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini kedalam 2 kajian, yaitu proses pelibatan *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata dan dampak dari adanya pengembangan desa wisata di Desa Kalongan.

Ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pada penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yaitu melihat bagaimana proses kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata.

Hasil studi ini dapat dijelaskan pada 2 poin, 1) proses tata kelola desa wisata di Kalongan dilakukan secara elitis, dimana pengembangan desa wisata didominasi oleh pemerintah desa, yaitu Kepala Desa sebagai aktor utama yang paling menentukan siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Kalongan. Adapun batas kolaborasi antar *stakeholder* hanya pada tahap implementasi 2) Dampak yang dihadirkan dari pelibatan antar *stakeholder* yaitu pemerintah desa, pengusaha lokal, dan masyarakat menghasilkan dampak dari segi pengelolaan yaitu terciptanya paket wisata sebagai bentuk produk Desa Wisata Kalongan akan tetapi sarana prasarana penunjang desa wisata dinilai belum lengkap. Adapun dampak perekonomian yang dirasakan masyarakat dinilai belum signifikan, karena pendapatan yang diperoleh bersifat musian tergantung banyak sedikitnya wisatawan yang berkunjung. Dampak sosial yang dirasakan yaitu masyarakat menjadi guyub dan saling gotong royong untuk melestarikan budaya lokal sebagai salah satu produk dari desa wisata.

Kata Kunci: *Desa Wisata, Tata Kelola Pemerintah Desa, Collaborative Governance*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
KATA PENGANTAR.....	IV
PERSEMBAHAN	VI
MOTTO	VII
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
1. Manfaat Teoritis	3
2. Manfaat Praktis	4
E. Tinjauan Pustaka	4
1. Kajian Pengembangan Desa Wisata Ekonomi.....	4
2. Pengembangan Desa Wisata dari segi politik	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sumber data dan jenis data	13
3. Teknik pengumpulan data	13
4. Teknik analisis data	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
<i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i>	17
A. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	17
1. Pengertian Governance.....	17
2. Pengertian Collaborative Governance	18
3. Indikator-Indikator <i>Collaborative Governance</i>	19
a) Kondisi Awal	20

b) Kepemimpinan Fasilitatif	20
c) Desain Kelembagaan	20
d) Proses Collaborative Governance	21
B. Pengertian Desa Wisata	23
BAB III	24
GAMBARAN UMUM DESA WISATA KALONGAN	24
A. Sejarah Desa Kalongan	24
B. Sejarah Terbentuknya Desa Wisata Kalongan	25
C. Kondisi Geografis Desa Kalongan	27
D. Kondisi Demografis Desa Kalongan	28
E. Struktur Sosial Ekonomi, dan Budaya	30
1. Struktur Sosial dan Ekonomi Desa Kalongan	30
2. Struktur Budaya di Desa Kalongan	33
a. Merti dusun	34
b. Nyadran	35
F. Struktur Politik di Desa Kalongan	36
1. BUMDes Kalongan Mandiri Jaya	36
2. Pokdarwis Loka Jaya	38
G. Jenis Objek Wisata di Desa Wisata Kalongan	43
1. Kayangan Tebing Alfath	43
2. Pasar Sawahan	44
3. Curug Gendhing Asmoro	44
4. Wisata Edukasi Jagad Domba	45
BAB IV	46
PROSES PELIBATAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA	46
A. Perencanaan pembangunan Desa Wisata Kalongan dalam kerangka <i>Collaborative Governance</i>	46
B. Pengambilan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan dalam kerangka <i>Collaborative Governance</i>	49
C. Implementasi Kebijakan Desa Wisata Kalongan dalam Kerangka <i>Collaborative Governance</i>	51
BAB V	62
DAMPAK PELIBATAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KALONGAN	62

a.	Dampak pengelolaan desa wisata terhadap pengembangan Desa Wisata Kalongan	62
b.	Dampak sosial dan ekonomi dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan	67
BAB VI	69
KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Desa Kalongan Per Dusun.....	28
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Kalongan Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 3. 3 Kelompok Usia Masyarakat Desa Kalongan	29
Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan	29
Tabel 3. 5 Mata Pencarian Masyarakat Desa Kalongan.....	30
Tabel 3. 6 Sentra Pertanian dan Perkebunan di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur	32
Tabel 3. 7 Struktur Organisasi BUMDes Kalongan Mandiri Jaya.....	37
Tabel 3. 8 Susunan Pengurus Pokdarwis Loka Jaya Tahun 2019	38
Tabel 4. 1 Peran masing-masing <i>stakeholder</i> dalam pengembangan.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gash	22
Gambar 3. 1 Merti Dusun.....	34
Gambar 3. 2 Kirab Budaya Merti Dusun.....	35
Gambar 3. 3 Tradisi Nyadran Masyarakat Desa Kalongan	35
Gambar 3. 4 Logo Pokdarwis Loka Jaya.....	39
Gambar 3. 5 Struktur Kepengurusan TP-PKK Desa Kalongan	40
Gambar 3. 6 Logo Karang Taruna Desa Kalongan.....	42
Gambar 3. 7 Objek Wisata Kayangan Tebing Alfath	43
Gambar 3. 8 Pasar Sawahan	44
Gambar 3. 9 Curug Gendhing Asmoro.....	45
Gambar 3. 10 Objek Wisata Jagad Domba.....	45
Gambar 4. 1 Musyawarah dengan <i>Stakeholder</i> Pengembang Desa Wisata	53
Gambar 4. 2 Musyawarah Kepala Desa dengan Pokdarwis	54
Gambar 4. 3 Pelatihan Homestay yang diikuti oleh Pokdarwis Loka Jaya	59
Gambar 4. 4 Kerja Bakti Pokdarwis dalam Merawat Lapak Pedagang di Pasar Sawahan	60
Gambar 4. 5 Peta Persebaran Pariwisata Desa Kalongan Ungaran Timur.....	61
Gambar 4. 6 Kegiatan Pembelajaran Luar Sekolah (PLS) Siswa SDN 1 Ungaran di Desa Wisata Kalongan.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dimana UU desa ini menjelaskan tentang komitmen untuk memberikan kewenangan kepada desa lebih luas untuk menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Selanjutnya dalam undang-undang desa dijelaskan bahwa pengelolaan aset desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup penduduk desa serta mengoptimalkan pendapatan desa. Hal ini mendorong pemerintah desa membuat suatu langkah strategis dalam usaha untuk mendorong masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi. Penting untuk memberikan dorongan positif yang dapat mengembangkan dan memotivasi masyarakat, salah satu cara efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan fokus yang lebih faktual, dan mempertimbangkan SDA, SDM, dan aspek kultural yang ada di wilayah desa. Dengan melakukan hal ini, desa dapat menjadi suatu bentuk unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yaitu dengan dibentuknya desa wisata. (Trisnawati, 2018).

Secara esensial desa wisata merupakan pengembangan suatu desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dan memiliki tema tertentu sesuai dengan karakteristik desa (Murdiyanto, 2011). Pengembangan desa wisata pada dasarnya dilakukan dengan berbasis pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri (Damanik, 2019). Tujuan dari pengembangan desa wisata yaitu untuk melestarikan desa dan memacu terjadinya ekonomi lokal. Dalam konsep desa wisata terkandung adanya keunikan yang bisa dioptimalkan oleh masyarakat setempat dan keunikan berupa fisik maupun non-fisik (Putra, 2013).

Fenomena pengembangan desa wisata ini kemudian banyak menarik para sarjana lain untuk mengkaji penelitian serupa. Sebagian sarjana melakukan penelitian yang memfokuskan pengembangan desa wisata dari segi ekonomi, sosial dan budaya yaitu kajian dari (Aryani, 2017), (Pamungkas, 2015), (Wuri, 2015), (Kusmayadi, 2020), dan (Gunawan, 2015). Studi ini menemukan bahwa adanya desa wisata membawa

pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat desa. Dari segi ekonomi, dengan adanya desa wisata membuat masyarakat desa menjadi sejahtera dengan terbukanya kesempatan kerja dan lapangan kerja seluas-luasnya, serta memberikan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat. Dilihat dari segi sosial dan budaya, adanya desa wisata membuat masyarakat desa memiliki kesadaran untuk lebih menjaga lingkungan desa, dan menimbulkan adanya budaya baru sebagai akibat dari percampuran budaya asing dari para wisatawan dengan budaya asli masyarakat desa.

Adapun kajian dari beberapa sarjana yang membahas tentang pengembangan desa wisata dengan melihat dari segi politik yaitu kajian yang dilakukan oleh (Setyowati, 2019), (Mahadewi, 2017), (Ali, 2020), (Yani, 2021), (Risanti, 2014), dan (Febrian, 2016). Dapat dijelaskan adanya tata kelola pemerintah yang baik akan terwujud pula pembangunan desa wisata yang maju dan berkelanjutan yang diharapkan dapat menjadi pembangunan jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan semua *stakeholder* terkait. Adanya konsep *collaborative governance* dinilai mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak sebagai perwujudan pengembangan desa wisata. Studi ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan desa wisata secara *collaborative governance* di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Desa Kalongan merupakan salah satu diantara sekian desa yang mendeklarasikan diri sebagai desa wisata. Desa wisata Kalongan berdiri pada tahun 2017 dan ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No 556/0389/2020. Pengembangan desa wisata di Kalongan masih belum berjalan dengan lancar seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kemampuan dan ketrampilan untuk selalu mengembangkan wisata yang selalu *update* dan masih minimnya partisipasi dari masyarakat desa untuk ikut berperan dalam mengembangkan wisata di Desa Kalongan. Maka dari itu perlu adanya keterlibatan antar *stakeholder*, yaitu pemerintah desa, pengusaha lokal, dan masyarakat. Setiap aktor yang terlibat dalam *collaborative governance* memiliki tugas dan fungsi yang saling berkesinambungan, sehingga perlu adanya sinergitas antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat. Karena keterlibatan antara ketiganya akan menjadi kunci keberhasilan suatu desa wisata.

Studi ini difokuskan dalam dua arena kajian; *pertama*, apakah dalam pembangunan wisata di Desa Kalongan, pemerintah desa melibatkan banyak *stakeholder*. *Kedua*, bagaimana proses kolaborasi diterapkan dalam pengembangan desa wisata Kalongan. Kajian ini penting dilakukan, secara teoritis studi ini dapat menyumbangkan khazanah diskursus tentang studi-studi pengembangan desa wisata dengan perspektif politik. Sedangkan secara praktis, studi ini digunakan untuk menambah referensi dan rujukan bagi sarjana lain yang akan mengkaji tema yang sama sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan khususnya ditingkat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka studi ini akan fokus pada dua arena kajian yaitu;

1. Bagaimana pelibatan *stakeholder* dalam proses pembangunan desa wisata di Desa Kalongan?
2. Bagaimana dampak pelibatan *stakeholder* terhadap pembangunan objek wisata di Desa Kalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam proses pembangunan desa wisata di Desa Kalongan
2. Untuk mengetahui dampak pelibatan *stakeholder* terhadap pembangunan objek wisata di Desa Kalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penulis yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Studi ini menyumbangkan khazanah diskursus tentang studi-studi pengelolaan desa wisata dengan perspektif politik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran literatur mengenai politik desa khususnya pada tata kelola pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Studi ini digunakan untuk menambah referensi dan rujukan bagi sarjana lain yang akan mengkaji tema yang sama.
- b. Studi ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan khususnya ditingkat desa.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang desa wisata sudah banyak dilakukan oleh para sarjana. Berdasarkan analisis penulis, dapat dikelompokkan menjadi dua tema yaitu, 1) kajian dengan melihat sisi ekonomi, sosial dan budaya desa wisata, 2) kajian sisi politik pengembangan desa wisata.

1. Kajian Pengembangan Desa Wisata Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2017; Pamungkas, 2015; Wuri, 2015; Kusmayadi, 2020; Gunawan, 2015) telah membahas kajian tentang pengembangan wisata dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Kajian pertama dari Aryani (2017) membahas tentang dampak yang terjadi akibat pembangunan desa wisata dari aspek ekonomi yaitu terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sedangkan dari aspek sosial yaitu adanya perlindungan dan pelestarian budaya serta adat istiadat dan meningkatnya kesadaran gotong royong. Kemudian kajian dari Pamungkas (2015) menjelaskan bahwa adanya desa wisata memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat khususnya pada perluasan lapangan kerja baik pada pekerjaan pokok maupun sampingan, dimana dengan adanya kegiatan pariwisata meningkatkan peluang usaha masyarakat. Kajian dari Wuri (2015) menjelaskan untuk dapat memperluas dampak ekonomi bagi desa wisata, perlu adanya partisipasi dari masyarakat desa seperti melakukan program pelatihan kewirausahaan. Sementara kajian dari (Kusmayadi, 2020) menjelaskan pengembangan sumber daya yang non-ekstraktif, non-konsumtif, dan berkelanjutan dalam bidang pariwisata menyebabkan kegiatan wisata tidak dirasakan adanya dampak negatif pada masyarakat, justru dengan adanya kegiatan wisata dapat membuka peluang pekerjaan sehingga peningkatan penghasilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian penelitian dari (Gunawan, 2015) telah membahas selain dampak positif yang dirasakan,

pengembangan desa wisata juga memiliki dampak negatif yaitu, berkurangnya interaksi sosial, berkurangnya solidaritas, dan berkurangnya pengawasan sosial antar masyarakat desa.

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Aryani (2017) berjudul *Analisis Dampak Pembangunan Pariwisata Pada Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat (Studi Kasus Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangharjo, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta)*. Dalam kajian ini peneliti membahas tentang analisis dampak pembangunan pariwisata pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan fokus kajian yaitu pelaksanaan pembangunan industri, keadaan masyarakat desa sebelum pembangunan pariwisata dari aspek ekonomi, dan sosial budaya serta dampak ekonomi dan sosial budaya yang ditimbulkan dari pembangunan wisata. Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pembangunan pariwisata pada sektor ekonomi dan sosial budaya masyarakat di Desa Wisata Bejiharjo.

Adapun hasil dari kajian ini yaitu pembangunan pariwisata yang dilakukan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial budaya, dampak tersebut tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak pada pengembangan wisata dari segi ekonomi yaitu terbukanya lapangan kerja baru, berkurangnya tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman. Lalu dampak dari segi sosial dan budaya yaitu aspek sosial yaitu adanya perlindungan dan pelestarian budaya serta adat istiadat dan meningkatnya kesadaran gotong royong. Penulis memberikan saran yaitu dilakukannya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Desa dan Pokdarwis perlu ditingkatkan serta melakukan pelatihan kewirausahaan terhadap masyarakat pelaku ekonomi wisata (Aryani, 2017).

Kedua, kajian dari Pamungkas (2015) yang berjudul *Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi, dan Masyarakat*. Penelitian ini mengkaji pengaruh keberadaan Desa Wisata Karangbanjar terhadap perubahan penggunaan lahan, ekonomi dan sosial masyarakat yang dapat dicapai melalui sasaran-sasaran seperti; identifikasi karakteristik desa wisata, identifikasi karakteristik pelaku usaha desa wisata,

menganalisis pengaruh desa wisata terhadap perubahan ekonomi, dan menganalisis pengaruh desa wisata terhadap perubahan sosial masyarakat.

Hasil dari pembahasan kajian ini yaitu keberadaan desa wisata sangat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Desa Karangbanjar. Lahan yang semula tegalan dan hutan berkurang sangat signifikan sekitar 60% karena dibangun homestay dan took serta sarana desa wisata seperti balai pertemuan dan koperasi untuk pokdarwis. Dari segi ekonomi, dapat dirasakan perubahannya secara signifikan terutama pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Perluasan kesempatan kerja bisa dilihat dari terciptanya lapangan pekerjaan dan pergeseran pekerjaan pokok seperti pengrajin kayu maupun sampingan seperti pemilik warung, adapun peningkatan pendapatan masyarakat desa bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan harian masyarakat karena faktor adanya desa wisata yang ramai akan pengunjung (Pamungkas, 2015).

Ketiga, kajian dari Wuri (2015) yang berjudul *Dampak Keberadaan Kampung Wisata Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat*. Dalam kajian ini memiliki fokus penelitian yaitu seberapa besar keterlibatan masyarakat Kampung Wisata Sosro dalam mendukung kegiatan pariwisata, bagaimana dampak keberadaan Kampung Wisata Sosro dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan mengetahui dampak keberadaan Kampung Wisata Sosro dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Adapun jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan studi kasus dimana penelitian ini dilakukan secara rinci mengenai suatu objek tertentu dan penarikan kesimpulan didapatkan hanya berlaku terhadap objek yang diteliti dalam kurun waktu tertentu.

Dalam kajian ini menjelaskan, dengan adanya Kampung Wisata Sosro sangat mengubah perekonomian masyarakat seperti memberi peluang kerja bagi masyarakat khususnya wirausaha untuk mengembangkan usahanya seperti penginapan, restoran/café/warung, minimarket, rental mobil, dan lain sebagainya. Keberadaan Kampung Wisata Sosro ini membuat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan gizi, sandang pangan dan papan serta kebutuhan yang lainnya terpenuhi adapun dampak dari keberadaan Kampung wisata Sosro dalam aspek sosial yaitu meningkatkan wawasan masyarakat, membuat masyarakat lebih komunikatif dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menempuh Pendidikan formal. Selain itu, dengan adanya Kampung Wisata Sosro mendukung pelestarian

warisan budaya seperti seni tari, jathilan, batik, dan gamelan. Dampak sosial relatif lebih dirasakan daripada dampak ekonomi karena model pariwisata yang lebih mengintegrasikan dunia wisata dengan kearifan, nilai dan budaya-budaya lokal (Wuri, 2015).

Keempat, kajian selanjutnya yang dilakukan Kusmayadi (2020) dengan judul *Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Terhadap Kondisi Sosial dan Lingkungan masyarakat (Studi di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Malang)*. Dalam kajian ini berfokus pada pengaruh keberadaan desadesa wisata terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat Desa Gubugklakah, mengingat bahwa keberadaan Kawasan pariwisata dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi hubungan interaksi manusia dengan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis data secara intensif.

Kajian ini menjelaskan pengembangan wisata desa sangat memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat khususnya pada kondisi lingkungan dan sosial. Pada aspek lingkungan, sejak dijadikannya pariwisata masyarakat desa memiliki kesadaran menjaga lingkungan yang sangat tinggi, seperti contoh membuang sampah pada tempat khusus dan mulai melakukan perubahan gaya hidup ramah lingkungan. Dalam aspek sosial, tidak di rasakannya dampak negatif bagi masyarakat desa. Peran masyarakat semakin meningkat untuk menjaga keberlanjutan kegiatan wisata di Desa Gubugklakah (Kusmayadi, 2020)

Kelima, kajian yang dilakukan oleh Gunawan (2015) dengan judul *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa Cihideung sebagai Desa Wisata*. Dalam kajian ini mengkaji tentang perubahan masyarakat Desa Cihideung yang mengalami perubahan sosial budaya dari desa yang semula merupakan desa yang didominasi oleh pertanian sawah dan sayuran menjadi desa wisata yang didominasi oleh berbagai macam pembangunan objek wisata beserta sarana pendukung lainnya yang dimiliki oleh para investor. Kajian ini membahas sebelum adanya desa wisata, masyarakat Desa mengalami ketertinggalan budaya (*culture lag*), dimana adanya berbagai macam pembangunan objek wisata beserta sarana pendukung pariwisata tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa. Adapun faktor terjadinya *culture lag* tersebut yaitu masyarakat

desa kalah bersaing untuk mengembangkan Desa menjadi desa wisata. Namun setelah adanya desa wisata di Desa mengakibatkan perubahan kondisi sosial dan budaya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa yaitu ditandai dengan interaksi sosial yang kuat dicerminkan dalam sikap gotong royong, saling membantu, dan proses sosialisasi yang terjadi pada masyarakat. Perubahan sosial budaya yang terjadi yaitu berkurangnya interaksi sosial, berkurangnya solidaritas sosial, meningkatnya eksistensi kesenian tradisional, mata pencaharian yang menjadi heterogen, dan terjadinya mobilitas sosial (Gunawan, 2015).

2. Pengembangan Desa Wisata dari segi politik

Kajian dengan tema serupa telah banyak di kaji oleh beberapa sarjana, antara lain (Setyowati, 2019; Ali, 2020; Yani, 2021; Risanti, 2016; Febrian, 2014). Pada kajian Setyowati (2019) membahas keberhasilan suatu desa dalam menjadikan sebuah desa menjadi desa yang maju dan berkembang disebabkan karena faktor tata kelola pemerintahan yang memiliki peran besar di bidang pemerintahan dan masyarakat yang berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Kajian Ali (2020) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik dan benar akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas, karena pelayanan yang optimal merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemudian kajian Yani (2020) menjelaskan bahwa standar keberhasilan tata kelola yang baik akan terwujud apabila keaktifan dan sinergi antar *stakeholder* yang maksimal serta dampak positif yang dihasilkan dapat dirasakan oleh semua pihak. Risanti (2016) memaparkan bahwa kerjasama antar *stakeholder* dalam mewujudkan tata kelola pengembangan desa dengan menggunakan konsep *collaborative governance* dinilai sangat tepat. Kajian Febrian (2014) membahas upaya kolaborasi yang dilakukan pemerintah baik tingkat daerah sampai nasional bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pertama, kajian yang dilakukan oleh Setyowati (2019) yang berjudul “*Tata Kelola Pemerintah Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang*”. Pada kajian ini memberikan fokus pada tata kelola pemerintahan berdampak pada hasil pembangunan dengan menggunakan teori *good governance* untuk melihat secara detail proses pengambilan keputusan,

eksekusi, dan administrasi desa. Kajian ini menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus sementara Teknik penentuan informan menggunakan *key people* yang memahami masalah tata kelola desa secara jelas.

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip *good governance*, tentu dibutuhkan kemitraan yang baik antar pihak dalam hal ini pemerintah desa dalam setiap proses pengambilan kebijakan selalu mengikutsertakan masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan seperti penyusunan APBDes dan pembuatan Peraturan Desa. dari segi faktor masyarakat terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat antar tiga desa, yaitu partisipasi masyarakat Desa Tumpang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Malangsono dan Pulungdowo. Adanya hasil yang positif pada tata kelola desa terhadap IDM, hal ini dapat dilihat dari faktor di tiga desa, yaitu bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan kebijakan, hal ini menyebabkan adanya pertentangan antar desa (Setyowati, 2019).

Kedua, kajian yang dilakukan oleh Ali (2020) yang berjudul “*Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*”. Fokus dari kajian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Pematang Johar dan untuk mengetahui tata kelola pemerintah terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar, dengan menggunakan teori *good governance* sebagai perwujudan pemerintahan yang baik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik.

Hasil dari kajian ini menjelaskan bahwa tata kelola di Desa Pematang Johar telah berjalan dengan baik yaitu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun keberhasilan dari tata kelola pemerintah desa yaitu melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat desa, dilihat dari terciptanya program pemerintah desa yaitu e-Desa sebagai wujud percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Program ini telah terlaksana dengan baik walaupun penerapannya belum

maksimal karena keterbatasan masyarakatnya untuk mengimplementasikan program tersebut (Ali, 2020).

Ketiga, kajian yang dilakukan Yani (2021) dengan judul “*Tata Kelola Desa Wisata di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu*”. Dalam kajian ini difokuskan untuk melihat tata kelola pariwisata yang telah dilaksanakan di Desa Nangamiro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Adapun hasil dari kajian ini yaitu pengelolaan wisata di desa ini belum maksimal bila ditinjau dari standar tata kelola pariwisata yang baik menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Hal ini dikarenakan pencapaian setiap standar pengelolaan belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang disebabkan karena keaktifan dan partisipasi antar *stakeholder* belum terwujud, kemitraan hanya sampai ke pemerintah desa serta belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, belum dilaksanakannya sosialisasi pengembangan wisata, minimnya promosi wisata, serta pedoman pemantauan dan evaluasi pengembangan wisata yang masih sederhana dan belum ada indikator khusus untuk mengukur dampak wisata yang dilakukan (Yani, 2021).

Keempat, kajian yang dilakukan oleh Risanti (2014) dengan judul “*Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul*”. Kajian ini berfokus pada proses kolaborasi pengembangan desa wisata Wukirsari dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut DeSeve. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif supaya dapat memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Hasil dari kajian ini berdasarkan implementasi teori *collaborative governance* menurut DeseVe dapat dipahami bahwa untuk struktur jaringan, pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan desa wisata antar tupoksi masing-masing dan keterlibatan swasta hanya berjalan pada awal-awal saja karena kolaborasi hanya bersifat bantuan infrastruktur saja. Bentuk struktur jaringan ini tidak terlalu banyak melibatkan *stakeholder*, tidak aktif dalam pertemuan, dan tidak ada struktur yang mengikat serta tidak ada yang mendominasi. Komitmen

antar *Stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata ini kurang maksimal karena tidak secara terus menerus kegiatan yang telah disepakati dapat dijalankan. Sudah adanya kepercayaan kolaborasi antar aktor dalam pengembangan desa wisata Wukisari karena kepercayaan merupakan suatu komponen keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam pengembangan desa wisata Wukirsari belum adanya *Momerandum of Understanding (MoU)* akan tetapi *stakeholder* hanya menempatkan diri sesuai dari wewenang tiap instansi. Selanjutnya, *stakeholder* memiliki otoritas dari masing-masing dan keterlibatan swasta sudah ada, sehingga *stakeholder* bisa menjalankan peran sesuai dengan otoritas masing-masing. Terkait penataan, pengelolaan, manajemen bersama-sama dengan *stakeholder*, pemerintah Desa Wukirsari sudah menentukan peran masing-masing *stakeholder* sesuai dengan bidang masing-masing. Kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata Wukirsari sudah memiliki kemudahan akses informasi sehingga *information sharing* dalam pengembangan desa wisata sudah dilakukan para aktor. Dalam pengembangan desa wisata Wukirsari, sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat masih terbatas baik dari sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana (Risanti, 2014).

Kelima, kajian dari Febrian (2014) yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)*”. Kajian ini berfokus pada potensi pembangunan kawasan perdesaan berbasis *collaborative governance* untuk membantu berbagai pihak yang akan mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan kawasan perdesaan dalam bentuk kebijakan maupun penelitian. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan Kawasan perdesaan dapat memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa ataupun sebaliknya melalui sebuah konsensus. Adapun permasalahan yang terjadi dalam konteks *collaborative governance* yaitu kurang berjalannya *sistem konteks* yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, *drivers* yang dilihat dari elemen *leadership* yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral. Konsep *collaborative governance* sebagai basis pembangunan desa dinilai mampu

memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan Kawasan pedesaan (Febrian, 2016).

Dari kajian Pustaka yang dilakukan diatas, pengembangan desa wisata dari sisi ekonomi memberikan kesempatan kerja yang luas guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa khususnya yang terlibat di sektor pariwisata, hal ini mengakibatkan kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Dilihat dari segi sosial dan budaya, adanya desa wisata sedikit banyaknya memberikan dampak positif bagi masyarakat, hal itu dapat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya warisan serta tumbuhnya sifat gotong royong antar warga. Adapun dampak negatif dari pengembangan desa wisata yaitu meningkatnya akulturasi di desa sehingga mengakibatkan berubahnya budaya asli suatu desa. Secara politik, adanya tata kelola pemerintah yang baik akan terwujud pula pembangunan desa wisata yang maju dan berkelanjutan yang diharapkan dapat menjadi pembangunan jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan semua *stakeholder* terkait. Adanya konsep *collaborative governance* dinilai mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak sebagai perwujudan pengembangan desa wisata.

Posisi penelitian ini dibanding penelitian yang lain yaitu jika Sebagian besar kajian-kajian diatas membahas tentang *Collaborative Governance* menitik beratkan pada proses yang dilihat untuk keseluruhan, maka pada penelitian ini menjelaskan secara spesifik terkait tentang bagaimana pelibatan *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata dan dampak dari pelibatan *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah awal untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yaitu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, antara lain:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2015). Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara,

dokumentasi, dan materi audio-visual. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data yang detail.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki subjek secara rinci dengan mengumpulkan informasi secara menyeluruh melalui berbagai prosedur pengumpulan data. Melalui studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menganalisis dengan lebih rinci tentang suatu fenomena terkait individu, kelompok, atau situasi (Cresswell, 2015). Tujuan dilakukan pendekatan dengan studi kasus yaitu untuk menggambarkan subjek secara lengkap dengan melakukan penelitian secara mendalam.

2. Sumber data dan jenis data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai dua data tersebut yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang secara langsung digali oleh peneliti dengan tujuan sebagai data pokok. Sumber yang menjadi data primer yaitu informasi yang didapat dari Pemerintah Desa Kalongan dan penduduk Desa Kalongan, serta dokumen-dokumen pendukung pariwisata di Desa Kalongan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di dapatkan peneliti sebagai data penunjang atau pendukung dan juga sebagai data tambahan. Adapun data sekunder yang ada di penelitian ini yaitu jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3. Teknik pengumpulan data

Di dalam penelitian perlu adanya data-data yang akurat agar dapat mengungkap permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Maka dalam mendapatkan data-data penunjang penelitian, upaya yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber, dengan tujuan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, wawancara memiliki peran yang penting (Rosaliza, 2015). Hal ini karena memungkinkan peneliti untuk

mendapatkan fakta dan informasi yang relevan dari perspektif narasumber yang terlibat. Wawancara merupakan proses yang esensial dalam pelaksanaan penelitian, terutama dalam konteks penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai berbagai narasumber yaitu mulai dari Kepala Desa Kalongan, Sekretaris Desa Kalongan, Ketua BUMDes Kalongan, Pokdarwis Desa Kalongan, masyarakat Desa Kalongan hingga Dinas Pariwisata Kab. Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang bertujuan untuk melengkapi penelitian. Adapun macam-macam dari dokumentasi yaitu sumber tertulis, gambar (foto), video, dan karya-karya yang bersejarah, yang semuanya itu dapat menjadi penunjang dalam melengkapi data-data didalam penelitian (Nilamsari, 2014). Adapun dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu RPJMDes, RKPDes, APBDes, AD/ART BUMDes dan Pokdarwis, serta dokumen pendukung pembangunan pariwisata.

4. Teknik analisis data

Data yang didapatkan setelah melakukan observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara mendalam agar data tersebut lebih bermakna. Proses Teknik analisis data dimulai dari penyusunan, pengkategorian, dan memadukan antara isi penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian supaya mendapatkan jawaban penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman: yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Hal pertama yang dilakukan adalah memilih data yang penting dari kumpulan informasi yang didapat sebagai penyederhanaan data. Proses ini merupakan langkah penentuan tema dan membentuk konsep. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti supaya peneliti memahami dan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan data yang telah dikumpulkan.

b. Penyajian data

Informasi yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti memahami kajian yang akan diteliti.

c. Penarikan kesimpulan

Selanjutnya hasil analisis yang didapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil dari penelitian dengan objek yang menjadi lokusnya. Hasil dari keseluruhan proses analisis data ini yaitu mengetahui tata kelola pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

Hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan informasi lalu memilih data penting yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan penelitian supaya peneliti memahami dan memungkinkan untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari penjelasan gambaran umum mengenai latar belakang yaitu penjelasan tentang desa, penjelasan tentang pengembangan desa, penjelasan tata kelola pemerintah desa, profil tentang Desa Kalongan, hingga alasan apa yang akan menjadi fokus penelitian, setelah itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari tiga pertanyaan tentang topik yang diangkat, yaitu 1) bagaimana pelibatan *stakeholder* dalam pembangunan wisata di Desa Kalongan, 2) bagaimana dampak pelibatan *stakeholder* dalam Pembangunan wisata di Desa Kalongan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang akan digunakan.

Bab kedua merupakan penjelasan mengenai kerangka teori. Kerangka teori merupakan gambaran atau teori-teori yang dijadikan dalam satu penjelasan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada penelitian tersebut. pada bagian ini penulis membahas mengenai kerangka teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* yaitu kerjasama antara pemerintah desa dengan sektor swasta dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.

Bab ketiga ini menjelaskan gambaran secara umum objek yang akan diteliti. Pada bab ini menjelaskan gambaran umum dari Desa Kalongan, yaitu letak geografis, struktur social dan budaya hingga ekonomi Desa Kalongan.

Bab keempat merupakan pembahasan mengenai proses tata kelola pengembangan Desa Wisata Kalongan dengan menggunakan prinsip *Collaborative Governance*

Bab kelima membahas tentang dampak dari tata kelola pengembangan Desa Wisata dengan prinsip *Collaborative Governance*.

Bab keenam penutup, dalam bab penutup ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari temuan dan analisis data yang diperoleh. Dalam kesimpulan ini, akan diuraikan bagaimana tata kelola pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata di Desa Kalongan. selain itu, akan diidentifikasi dampak dari adanya pelibatan *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan.

BAB II

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Kerangka teori merupakan alur pemikiran antara satu konsep dengan konsep yang lainnya guna memperoleh gambaran dengan mengarahkan asumsi terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori *collaborative governance* yaitu mengenai kolaborasi pemerintah desa bersama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam mengembangkan desa wisata.

A. Konsep *Collaborative Governance*

1. Pengertian Governance

Konsep tata kelola (*governance*) merupakan perubahan paradigma dari Pemerintahan (*goverement*) ke tata kelola (*governance*). *Government* merujuk pada istilah yang digunakan organisasi atau Lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pada suatu pemerintahan. pada tahun 1950-1960-an, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pemerintah memegang peran dominan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam pembangunan ekonomi (Santosa, 2008). Akan tetapi pada tahun 1990-an terjadi pergeseran paradigma era *government* ke era *governance* yang melibatkan transfer wewenang dari pemerintah ke sektor non-pemerintah seperti pihak swasta, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Hal ini menyebabkan peran sektor non-pemerintah serta terbukanya akses yang lebih luas dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. (Nurhadryani, 2022).

Governance yaitu proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah. *Governance* mengacu pada hubungan antara pemerintah atau negara dengan warganya, yang memungkinkan perumusan, implementasi, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program (Dewi, 2019). Konsep *Governance* yaitu mengenai keterlibatan aktor-aktor diluar pemerintah dalam merespon permasalahan publik (Dwiyanto, 2008). Lebih lanjut pembahasan secara signifikan mengenai konsep *governance* oleh Teguh Kurniawan, yaitu sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, sektor privat (swasta), dan masyarakat (Kurniawan, 2007). Berdasarkan definisi

governance dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa *governance* adalah keterlibatan sektor lain dalam pemerintahan, dalam hal ini pemerintah bukanlah aktor utama dalam pemerintahan. Pemerintah dalam menjalankan urusan-urusan publik perlu bantuan dari pihak luar yang tentunya sesuai dengan kapasitas atau kemampuan lebih yang tentunya dapat membantu pemerintah. Karena pemerintah memiliki keterbatasan kapabilitas dalam hal sumberdaya dan finansial. Pemerintah dalam menjalankan tata kelola dibantu oleh pihak swasta dan masyarakat, karena ketiga *stakeholder* ini merupakan aktor utama dalam proses *governance*.

2. Pengertian Collaborative Governance

Kolaborasi dapat dimaknai sebagai upaya bersama yang melibatkan penggabungan tenaga untuk mencapai tujuan yang sama. Istilah kolaborasi sering digunakan dalam konteks kerja lintas batas, lintas sektor, dan melibatkan berbagai hubungan (Aeni, 2019). *Collaborative Governance* adalah salah satu bentuk tata kelola yang penting. Konsep *Collaborative Governance* menekankan pentingnya kerja sama antar aktor public dan aktor swasta dalam proses tertentu untuk menghasilkan produk hukum, peraturan, dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik secara aktif melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan yang memiliki struktur formal. Pendekatan ini ditujukan untuk mencapai konsensus dan melibatkan dialog yang mendalam untuk mengimplementasikan kebijakan public atau mengatur program (Ansell, 2008). Menurut Robertson (2010), *collaborative governance* yaitu proses kolaboratif egalitarian yang mana setiap partisipasinya memiliki otoritas dalam sebuah pengambilan keputusan. Subarsono (2011) menyatakan bahwa *collaborative governance* tidak hanya berpangku pada pemerintah maupun pemangku kepentingan, namun terbentuk atas adanya “*multi partner governance*” yang meliputi sektor privat, masyarakat sipil yang terbentuk karena adanya kerjasama sosial. Dari pengetahuan para ahli, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* yaitu pemerintah dan sektor privat (swasta) perlu bekerjasama untuk kepentingan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa *Collaborative governance* merupakan suatu pengaturan tata kelola pemerintahan dimana institusi publik aktif melibatkan *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi pada pencapaian konsensus, dan melibatkan konsultasi. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif. Menurut Mc Guire dan Arganoff dalam (Chang, 2009), *collaborative governance* ditekankan pada kolaborasi horizontal antara partisipan multisektoral. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang serih melebihi kapasitas dan peran organisasi terkait yang terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi menjadi krusial untuk menciptakan struktur tata kelola yang efektif dalam mengelola berbagai pemerintahan, organisasi, dan sektor yang berbeda. Baik definisi dari Ansell dan Gash maupun Agranoff dan McGuire menggambarkan *Collaborative Governance* dengan prinsip yang sama. Namun, penjelasan dari Ansell dan Gash lebih menekankan aspek kolaborasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh pemerintah. Dalam praktiknya, kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah harus menghargai nilai musyawarah dan konsensus diantara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi tersebut. Sementara itu, dalam pandangan Agranoff dan McGuire, *Collaborative Governance* memiliki cakupan yang lebih umum, mencakup seluruh penyelenggaraan pemerintahan.

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa tujuan dari kolaborasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara para *stakeholder* yang terlibat. Mereka juga menyoroti enam kriteria penting dalam kolaborasi yaitu; 1) kolaborasi diinisiasi oleh Lembaga public, 2) partisipan kolaborasi melibatkan aktor non-pemerintah, 3) partisipan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya terlibat dalam “konsultasi” dengan lembaga publik, 4) kolaborasi diadakan secara formal dan melibatkan pertemuan kolektif, 5) tujuan kolaborasi adalah mencapai keputusan melalui konsensus, dan 6) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan public atau manajemen public.

3. Indikator-Indikator *Collaborative Governance*

Model kebijakan kolaborasi dimulai dengan mengidentifikasi masalah lokal yang kemudian dihadapi oleh masyarakat. Tujuan kolaborasi yaitu untuk mengatasi masalah atau isu-isu yang timbul. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama aktif diperlukan, dan proses kolaboratif memainkan peran penting. Dalam proses ini,

komunikasi yang efektif antar para *stakeholders* yang terlibat menjadi kunci, karena dapat mencegah timbulnya rasa ketidakpercayaan dan ketimpangan antara kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat. Selain itu, kondisi masalah lokal dalam proses kebijakan kolaborasi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti desain kelembagaan dan kepemimpinan yang seringkali mempengaruhi jalannya proses kolaborasi.

a) **Kondisi Awal**

Kondisi awal ini merujuk pada permulaan dimana terjadi proses kolaborasi dalam pemerintahan. Biasanya, kondisi awal didorong oleh visi yang sama dalam mencapai tujuan bersama dan mendapatkan manfaat dalam proses kolaborasi. Terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi munculnya kondisi awal dalam *Collaborative Governance*, yaitu ketidakseimbangan sumberdaya, sejarah masa lalu, dan insentif.

b) **Kepemimpinan Fasilitatif**

Kepemimpinan berperan sebagai fasilitator yang dapat mengarahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi. Pemimpin kolaboratif yang ideal harus memiliki keterampilan untuk 1) mendorong partisipasi luas dan aktif, 2) memastikan pengaruh dan kontrol yang luas, 3) memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif, dan 4) memperluas cakupan proses. Kepemimpinan fasilitatif memainkan peran penting dalam merangkul, memberdayakan, dan melibatkan semua elemen agar proses kolaborasi dapat sesuai rencana. Pentingnya membawa para pemangku kepentingan bersama-sama dan membuat semua aktor terlibat dalam semangat kolaborasi. Dalam peran kepemimpinan fasilitatif, penting untuk memberdayakan elemen-elemen yang lemah agar mereka dapat beradaptasi dengan baik.

c) **Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip yang mengatur *Collaborative Governance* dengan cara yang jelas dan konsisten, sehingga memastikan bahwa para pemangku kepentingan merasa bahwa proses tersebut adil dan transparan.

d) Proses Collaborative Governance

Dalam sebuah kolaborasi terdapat proses yang menjadi kunci gagal atau berhasilnya sebuah. Proses kolaboratif merupakan faktor penting yang dimulai dari membangun kepercayaan pada *stakeholder* melalui dialog yang baik dengan didukung oleh komitmen yang kuat. Setelah mencapai komitmen yang tinggi antar *stakeholder*, mereka akan memahami masalah yang sedang dihadapi bersama, mengidentifikasi nilai-nilai, dan memiliki misi yang jelas. Setelah terjadi kesepakatan dan pemahaman bersama, rencana strategis akan ditetapkan menjadi sebuah kolaborasi. Berikut merupakan penjelasan tahapan proses kolaborasi menurut dari Ansell dan Gash.

1. Dialog tatap muka

Dialog antar muka sebagai bentuk komunikasi merupakan peran penting dalam kolaborasi, terutama dalam proses mencapai konsensus. Komunikasi langsung menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi stereotip dan meningkatkan sifat saling menghormati antar para aktor yang terlibat. Dengan adanya dialog tatap muka, aktor-aktor tersebut dapat berinteraksi dengan lebih objektif dalam kolaborasi.

2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan syarat penting dalam membentuk kolaborasi yang kokoh. Proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang tidak singkat, terutama dalam konteks kolaborasi yang melibatkan komunikasi intensif dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini yang mungkin mencakup konflik masa lalu.

3. Komitmen terhadap proses

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Mutual recognition yaitu berkaitan dengan pengakuan bersama
2. Joint appreciation yaitu apresiasi bersama para aktor
3. Kepercayaan antar aktor
4. Ownership the procces
5. Interpendence

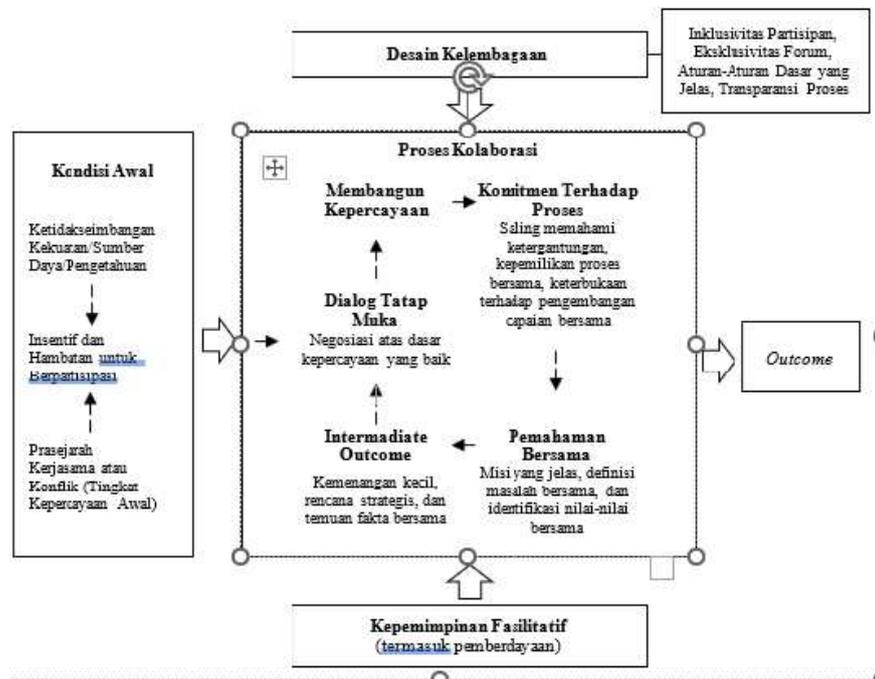
4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama memegang peranan krusial dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman ini dapat dijelaskan sebagai kepemilikan visi misi bersama, tujuan bersama, dan objektif bersama. Pemahaman ini melibatkan penyatuan pemikiran dan kesepakatan tujuan yang sama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman diantara para aktor yang terlibat.

5. Dampak sementara

Dampak sementara suatu upaya kolaborasi, diharapkan menghasilkan umpan balik yang berupa kemenangan kecil, atau biasa disebut *small wins*. Kemenangan-kemenangan kecil ini dapat meningkatkan harapan individu yang terlibat dalam kolaborasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan komitmen antar *stakeholder*.

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash

B. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan desa yang menawarkan keberagaman kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi berbagai komponen wisata (Suranny, 2021). Desa wisata adalah bentuk upaya pengembangan suatu wilayah desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Konsep ini melibatkan pemanfaatan berbagai unsur yang ada di desa sebagai atribut wisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan baik dari segi daya tarik maupun fasilitas pendukung (Muljadi, 2012).

Desa wisata perlu dilakukan pengembangan supaya menjadi desa wisata yang berkembang dan maju. Pengembangan desa wisata merupakan suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan dan memajukan desa wisata serta melengkapi segala fasilitas yang ada dalam memenuhi kebutuhan para wisatawan. Pengembangan desa harus dilakukan untuk terciptanya desa wisata yang berkelanjutan. Pengembangan desa wisata ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk dapat menjadi masyarakat desa yang mandiri melalui pengembangan potensi unggulan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa (Soleh, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa desa wisata yaitu suatu wilayah yang menjadi obyek wisata dimana area tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah yang lain seperti keindahan alamnya, budaya dan keseharian masyarakat yang unik sehingga wisatawan tertarik untuk terjun langsung ke desa wisata.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA WISATA KALONGAN

A. Sejarah Desa Kalongan

Berdasarkan cerita turun temurun yang tidak tertulis, diperkirakan pada sekitar tahun 1825-1830 saat terjadi perang Diponegoro, beberapa prajurit Diponegoro ditangkap dan salah satunya datang ke desa ini. Kedatangannya membuka desa ini hingga berakhirnya perang Diponegoro. Pada awalnya, hanya ada tiga desa di daerah ini, yaitu Kajangan, Mendiro, dan Kalongan, kemudian ketiga desa tersebut mendapatkan tambahan pengungsi dari desa-desa yang rusak akibat bencana longsor. Desa Tugusari, Desa Jeruksiring, Desa Pangayuhan, dan lainnya adalah beberapa desa yang bergabung sebagai tambahan dari pengungsi. Akibat bencana tersebut, desa-desa dibagian bawah harus direlokasi dan menjadi satu dusun baru yang dikenal sebagai Dusun Ngaliyan. Nama tersebut diambil dari desa-desa yang ikut direlokasi, selain Dusun Ngaliyan, Dusun Rejowinangun juga terbentuk dari tambahan desa-desa yang direlokasi dan kini menjadi salah satu dusun di Desa Kalongan. sampai saat ini, kedua daerah tersebut masih mengalami tanah longsor karena tanah yang labil.

Untuk struktur kepala desa, pertama kali Desa Kalongan dipimpin oleh Mbah Sumitro pada era sebelum kemerdekaan. Setelah itu kepemimpinan dipegang oleh Bapak Sukarjo Mui yang menjadi kepala desa pada era kemerdekaan hingga sekitar 1970-an. Setelah itu, beberapa kepala desa lainnya telah menjabat di Desa Kalongan, dengan total tujuh kepala desa yang diketahui. Usia Desa Kalongan sekitar 150 tahun. Terkait dengan penamaan Desa Kalongan, hanya ada mitos yang beredar karena banyaknya warga yang sering hilang. Mitos tersebut menyebutkan bahwa banyak penduduk yang memiliki ilmu tinggi melakukan migrasi keluar dari Desa Kalongan yang sering disebut “kalong”, oleh karena itu desa ini dinamakan Desa Kalongan.

B. Sejarah Terbentuknya Desa Wisata Kalongan

Desa Kalongan merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama karena topografi di Desa Kalongan berada di perbukitan, maka banyak masyarakat yang masih bergantung ekonomi pada hasil kebun. Hasil pertanian tersebut adalah padi, ubi-ubian, buah-buahan, dan sayuran, serta di bidang peternakan yaitu peternak domba. Pendapatan sebagai petani dinilai masih kurang karena harga pasar sangat rendah membuat petani resah. Tidak stabilnya harga bahan pokok yang tidak sepadan dengan jerih payah dinilai kurang menunjang perekonomian desa. Melihat fenomena tersebut, pemerintah desa berusaha menggali potensi-potensi di Desa Kalongan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian Desa Kalongan. Pemerintah desa melalui BUMDes mulai menggali potensi unggulan yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa Kalongan.

Desa Kalongan memiliki potensi unggulan yaitu dilihat dari kondisi geografis, Desa Kalongan letaknya sangat strategis yaitu berada pada ketinggian 339 M dari permukaan laut yang memiliki perkebunan, persawahan, dan perbukitan yang masih asri. Desa Kalongan juga terletak diantara jalur penghubung wilayah Semarang – Mranggen yang ramai dilalui oleh orang-orang dari Semarang menuju Demak maupun Sebaliknya. Selain dilihat dari potensi alam, Desa Kalongan memiliki sumber daya manusia dan sumber daya budaya. Masyarakat Desa Kalongan masih menjaga sifat kekeluargaan dan saling memiliki satu sama lain yang masih sangat kental seperti gotong royong dan melestarikan tradisi dan budaya seperti pelaksanaan tradisi Nyadran dan Merti Desa yang aktif dilakukan setiap tahun. Melihat potensi-potensi tersebut, Kepala Desa Kalongan memiliki wacana untuk menjadikan Desa Kalongan menjadi desa wisata yang mengunggulkan potensi alam dan tradisi masyarakat Desa Kalongan. Melihat potensi yang sangat menunjang, pemerintah desa Kalongan merencanakan untuk membangun desa wisata yang tujuan utamanya adalah sebagai pusat perekonomian masyarakat desa dan memperkenalkan Desa Kalongan kepada masyarakat luas.

Tujuan pembentukan Desa Wisata Kalongan ini tidak semata hanya untuk membangun pariwisata sebagai destinasi wisata bagi masyarakat dan untuk mengenalkan Desa Kalongan kepada masyarakat luas, akan tetapi juga dapat bertujuan sebagai peluang terjadinya perputaran ekonomi di Desa Kalongan yang mana diharapkan sebagai multiplier efek domino dari perputaran ekonomi tersebut. Hal ini kembali dijelaskan oleh Ketua BUMDes, sebagai berikut:

“Kebijakan yang dibuat oleh Pak Kades sudah mengarah ke potensi pengembangan wisata yang melibatkan tidak hanya pemerintah desa saja, namun kelompok sadar wisata dan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Pak Kades juga berpendapat bahwa Desa Wisata tidak hanya desa yang memiliki objek wisata, namun apapun yang ada di Desa Kalongan yang bisa membuat tertarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Kalongan, termasuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan wisatawan berkunjung ke Desa Kalongan, secara ekonomi akan ada peluang, seperti adanya rumah makan, toko oleh-oleh dan toko kelontong akan meningkat pendapatannya”. (Wawancara, Bapak Sigit, 23 Mei 2023).

Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan adat istiadat yang masih kental di Desa Kalongan membuat Pemerintah Desa sepakat untuk mendeklarasikan diri menjadi desa wisata. Hal ini dilihat dari letak geografis Desa Kalongan yang sangat strategis berada di perbukitan serta memiliki kekayaan alam yang melimpah, memiliki sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat yang masih memegang tinggi adat istiadat, dan memiliki aneka budaya yang unik dan menarik. Berikut penjelasan mengenai pembentukan Desa Wisata Kalongan oleh Sekretaris Desa Kalongan sebagai berikut:

“Hampir semua entitas yang ada di Desa Kalongan kita dorong untuk menjadi entitas pariwisata, yang jelas kita kelompokkan menjadi beberapa klasifikasi yaitu yang pertama alam, di Desa Kalongan terdapat persawahan yang kita manfaatkan menjadi destinasi wisata Pasar Sawahan, ada air terjun yang kita kelola melalui BUMDes menjadi objek wisata Curug Gendhing Asmoro, lalu ada perbukitan yang dibangun oleh swasta yaitu Organisasi Masjid Jami, Al-Fata’ yang berkolaborasi dengan pemerintah desa dengan dibangun objek wisata Kayangan Tebing Alfath, dan berbagai jenis potensi alam yang sebisa mungkin kita kembangkan menjadi objek wisata. Lalu yang kedua masyarakat, melihat potensi masyarakat yang begitu besar kita membuat hal itu menjadi wisata edukasi, seperti masyarakat yang mempunyai peternakan kita ajak kolaborasi untuk menjadikan wisata edukasi Jagad

Domba, masyarakat yang mempunyai sanggar seni kita ajak kolaborasi untuk membuat pelatihan budaya jawa dengan mendirikan Sanggar Budaya Condrowinoto. Yang ketiga, adat isiadat yang masih kental dilakukan oleh Masyarakat Desa Kalongan yang kita manfaatkan sebagai salah satu bagian dari Desa Wisata Kalongan, yaitu penyelenggaraan Merti Dusun, Sedekah Bumi, Nyadran, dan lain sebagainya". (Wawancara, Bapak Fajar, 4 Mei 2023).

Dapat disimpulkan bahwa Desa Kalongan dilihat dari letak geografis yang sangat mendukung untuk dijadikan destinasi wisata, selain itu Desa Kalongan memiliki SDA yang melimpah dan SDM yang mendukung, tradisi dan budaya Desa Kalongan juga masih terasa kental menjadi faktor yang sangat mendukung untuk dijadikan desa wisata. Dibentuknya Desa Wisata Kalongan diharapkan dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui wisatanya. Selain itu, dengan adanya desa wisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian.

C. Kondisi Geografis Desa Kalongan

Desa Kalongan merupakan salah satu desa di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, yang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Sisi barat wilayah Desa Kalongan berbatasan dengan wilayah Kalirejo-Susukan, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Leyangan – Wringinputih, di sisi timur wilayah berbatasan dengan Desa Gondorio, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalikayen. Adapun luas dari Desa Kalongan secara keseluruhan yaitu sebesar $863,300 \text{ km}^2$ secara administrative terdiri dari 12 wilayah Dusun, 17 RW, dan 88 RT. Secara geografis Desa Kalongan terletak diantara jalur penghubung pusat perkembangan wilayah Semarang – Solo yang mana Desa Kalongan berada di posisi yang sangat strategis. Hal inilah yang membuat Desa Kalongan memiliki kekuatan untuk menjadi modal pembangunan Desa.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Desa Kalongan Per Dusun

No.	Dusun	Luas (Ha)	%
1.	Dampu	41,83	4,8
2.	Kajangan	95,25	11,1
3.	Bandungan	49,93	5,8
4.	Sepete	45,59	5,3
5.	Sigude	26,35	3,1
6.	Bulu	52,39	6,1
7.	Mendiro	93,82	10,9
8.	Kalongan	107,09	12,5
9.	Glepung	85,97	10,1
10.	Tompogunung	55,84	6,5
11.	Rejowinangun	56,51	6,6
12.	Pringkurung	91,21	7,2
13.	Ngaliyan	61,52	7,2
JUMLAH		863,300	100

Sumber: RPJMDes Desa Kalongan Tahun 2019-2025

D. Kondisi Demografis Desa Kalongan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kalongan pada tahun 2022 tercatat berjumlah 13.647 yaitu 6.744 laki-laki, dan 6.873 perempuan. Adapun presentase kelompok umur dengan rincian 0-14 tahun berjumlah 3.408 jiwa, 15-64 tahun berjumlah 9.338 jiwa, dan umur 65 tahun keatas berjumlah 901 jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Desa Kalongan.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa Kalongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Laki-laki	6.744
2.	Perempuan	6.873
TOTAL		13.647

Sumber: Profil Desa Kalongan 2022

Tabel 3. 3 Kelompok Usia Masyarakat Desa Kalongan

No.	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	0-14 Tahun	3.408
	15-64 Tahun	9.388
	>65 Tahun	901
TOTAL		13.647

Sumber: Profil Desa Kalongan 2022

2. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Kalongan rata-rata mengenyam pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Akademi/Universitas. Dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan di Desa Kalongan tergolong standar, masyarakat Desa Kalongan didominasi oleh lulusan SD-SMA/Sederajat disbanding dengan akademisi di tingkat perguruan tinggi.

Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	3.880
Belum Tamat SD/Sederajat	971
Tamat SD/Sederajat	2.921
SMP/Sederajat	2.259
SMA/Sederajat	2.830
Diploma I/II	31
Akademi/Diploma III/S. Muda	229
Diploma IV/Strata I	505
Strata II	16
Strata III	5
JUMLAH	13.647

Sumber: Profil Desa Kalongan Tahun 2022

E. Struktur Sosial Ekonomi, dan Budaya

1. Struktur Sosial dan Ekonomi Desa Kalongan

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Kalongan didominasi oleh pekerjaan buruh harian lepas yang berjumlah 1.911 masyarakat. Sementara itu masyarakat yang lainnya memiliki mata pencaharian yang beragam. Potensi yang unggul di Desa Kalongan yaitu pertanian dan perkebunan. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Kalongan.

Tabel 3. 5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalongan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	3.581
2.	Mengurus Rumah Tangga	960
3.	Pelajar/Mahasiswa	1.822
4.	Pensiunan	61
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	126
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	49
7.	Kepolisian RI	21
8.	Perdagangan	30
9.	Petani/Pekebun	372
10.	Nelayan/Perikanan	1
11.	Industri	2
12.	Transportasi	1
13.	Karyawan Swasta	3.013
14.	Karyawan BUMN	18
15.	Karyawan BUMD	1
16.	Karyawan Honorer	6
17.	Buruh Harian Lepas	1.911
18.	Buruh Tani/Perkebunan	17
19.	Pembantu Rumah Tangga	1

20.	Tukang Batu	3
21.	Tukang Jahit	1
22.	Mekanik	4
23.	Pendeta	1
24.	Ustadz/Mubaligh	1
25.	Dosen	4
26.	Guru	60
27.	Pengacara	1
28.	Dokter	3
29.	Bidan	6
30.	Perawat	16
31.	Pelaut	2
32.	Sopir	12
33.	Pedagang	28
34.	Perangkat Desa	10
35.	Kepala Desa	1
36.	Wiraswasta	1,499
37.	Lainnya	2
JUMLAH		13,647

Sumber: Profil Desa Kalongan Tahun 2022

Pembangunan yang dilakukan dalam mengembangkan wilayah di Desa Kalongan berpegang teguh pada aspek integritas, sinergitas, dan kontinuitas . dalam hal ini pembangunan desa yang sedang berlangsung merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan yang diambil adalah dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan melestarikan potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Kalongan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Adapun potensi yang dimiliki oleh Desa Kalongan yaitu dibidang pariwisata, pertanian, dan jasa. Hal ini dikarenakan letak Desa Kalongan yang sangat strategis serta memiliki kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh desa lain sebagai modal yang harus dikelola seoptimal mungkin. Pariwisata di Desa Kalongan tersebar dalam 12 dusun yang meliputi obyek wisata urug Gending Asmoro, Tebing Kayangan Alfath, Pasar Sawahan, dan Jagad Domba serta pertanian tanaman pangan, pertanian dan perkebunan. Sektor pariwisata inilah yang menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian desa.

Tabel 3. 6 Sentra Pertanian dan Perkebunan di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur

No.	Jenis Tanaman Pangan dan Buah	Sentra Produksi
1.	Padi	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Ngaliyan
2.	Jagung	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Ngaliyan
3.	Kacang Tanah	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Ngaliyan
4.	Ubi Kayu	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Ngaliyan
5.	Ubi Jalar	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Ngaliyan

6.	Alpukat	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Ngaliyan
7.	Mangga	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Pringkurung, Rejowinangun, Ngaliyan
8.	Rambutan	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Ngaliyan
9.	Durian	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Ngaliyan
10.	Pisang	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Ngaliyan
11.	Salak	Bulu, Mendiro
12.	Kelengkeng	Kajangan, Bandungan, Kalongan.
13.	Nangka	Dampu, Kajangan, Bandungan, Sipete, Sigude, Bulu, Mendiro, Kalongan, Glepung, Tompogunung, Rejowinangun, Pringkurung, Ngaliyan

Sumber: RPJMDes Desa Kalongan Tahun 2019-2025

2. Struktur Budaya di Desa Kalongan

Desa Kalongan merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya masih memegang penuh adat dan tradisi yang ada di Desa Kalongan. berikut merupakan beberapa tradisi yang ada di Desa Kalongan:

a. Merti dusun

Merti Dusun Kalongan yaitu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalongan untuk membersihkan lingkungan. Merti desa dikenal juga sebagai “bersih-bersih desa”, pada dasarnya Merti Dusun melambangkan rasa syukur masyarakat kepada pencipta atas berkat rezeki yang melimpah, keselamatan, kedamaian, dan harmoni dalam kehidupan. Merti Dusun dilaksanakan di Dusun Glepung Desa Kalongan setiap bulan Suro sesuai dengan adat setempat yang dianggap sebagai bulan suci. Selain kegiatan Merti Dusun juga terdapat pertunjukan wayang kulit dan pengajian.

Gambar 3. 1 Merti Dusun



Sumber: <https://desakalongan.com/merti-dusun-glepung-desa-kalongan-ungaran-timur-2022/>

Selain menampilkan pertunjukkan wayang kulit dan pengajian, Merti Desa Kalongan juga mengadakan kirab budaya. Uniknya, kirab budaya ini dilaksanakan malam hari. Kegiatan yang dilakukan saat kirab budaya yaitu mengarak berbagai macam hasil bumi yang setelahnya akan dibagikan kepada masyarakat sebagai syukuran bersama. Kegiatan ini merupakan bentuk guyub rukun antar warga Kalongan dan tanpa membeda-bedakan status dan jabatan.

Gambar 3. 2 Kirab Budaya Merti Dusun



Sumber: Web Desa Kalongan

b. Nyadran

Nyadran berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu kata *saraddha* yang berarti keyakinan. Nyadran merupakan tradisi membersihkan makam leluhur dan menabur bunga. Dalam Bahasa Jawa, Nyadran berasal dari kata sadran yang memiliki arti ruh orang yang meninggal. Biasanya tradisi Nyadran dilakukan oleh masyarakat Desa Kalongan setiap hari ke-10 bulan Rajab atau satu bulan sebelum bulan Sya'ban. Tradisi Nyadran di Desa Kalongan dimaknai sebagai simbol kerukunan masyarakat.

Tradisi Nyadran ini merupakan ajang penyambung silaturahmi, selain itu juga sebagai upaya untuk melestarikan tradisi warisan leluhur. Acara Nyadran diawali dengan berdoa dimakam leluhur, sambutan Kepala Desa, ceramah tokoh agama, pembacaan tahlil dan diakhiri dengan makan bersama. Suasana kebersamaan ini sangat terlihat antar masyarakat dan berlangsung secara khidmat dan sederhana.

Gambar 3. 3 Tradisi Nyadran Masyarakat Desa Kalongan



Sumber:

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/14/07333461/merawat-kerukunan-melalui-tradisi-sadranan?page=all>

F. Struktur Politik di Desa Kalongan

1. BUMDes Kalongan Mandiri Jaya

BUMDes Kalongan berdiri pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Desa Kalongan Nomor 02 Tahun 2013 dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Awal terbentuknya BUMDes KMJ Kalongan didasari oleh keinginan pemerintah desa untuk menggali potensi-potensi yang ada di Desa Kalongan supaya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa, maka dibentuklah BUMDes KMJ Desa Kalongan. Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes KMJ yaitu jasa, pariwisata, penyaluran bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta kontraktor dan perdagangan umum.

BUMDes Kalongan Mandiri Jaya dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagai sarana dan inisiatif untuk menggerakkan perekonomian di Desa Kalongan, BUMDes didirikan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui optimalisasi potensi yang ada di Desa Kalongan. Pemerintah Desa Kalongan telah membantu unit usaha BUMDes yang diberi nama Kalongan Mandiri Jaya dengan rincian sebagai berikut:

1) Unit Usaha Pariwisata

Usaha wisata yang didirikan oleh BUMDes yaitu Curug Gendhing Asmoro. Wisata alam ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Desa Kalongan dan diawasi oleh Pemerintah Desa guna mengoptimalkan pengembangan wisata alam. Wisata ini juga didampingi oleh Pokdarwis sebagai pemelihara wisata dan sebagai pelaku wisata. Selain Curug Gendhing Asmoro, terdapat destinasi wisata Pasar Sawahan dan Kayangan Tebing Alfath. Pasar Sawahan dikelola oleh Pokdarwis yang berkolaborasi dengan BUMDes dan destinasi wisata Kayangan Tebing Alfath yang dikelola oleh Organisasi PPMJA dibawah naungan BUMDes.

2) Unit Usaha Persampahan

Unit usaha persampahan merupakan usaha dibidang pengambilan dan pengelolaan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga, termasuk sampah organik dan non-organik. Sampah-sampah yang diambil dari masyarakat akan dikumpulkan di bank sampah lalu kemudian diangkut DLH Kab. Semarang. Tujuan diadakannya usaha unit persampahan ini untuk membantu masyarakat

menjaga kebersihan lingkungan. Dengan tersedianya jasa pembuangan sampah yang efisien dan teratur, unit usaha ini telah berkontribusi dalam memelihara kebersihan lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

3) Unit Usaha Sembako

Unit ini berfokus pada penjualan bahan sembako. Dalam penjualannya BUMDes bekerja sama dengan warung sembako yang memiliki platform e-Warung yang telah ditunjuk oleh desa sebagai sebagai tempat pendistribusian bantuan sosial masyarakat Desa Kalongan. BUMDes juga melakukan kerjasama dengan petani dan masyarakat desa untuk melakukan kegiatan jual beli bahan sembako dengan harga yang standar. Unit usaha sembako Desa Kalongan terpilih menjadi pemasok bahan baku pokok untuk BUMDes di Ungaran Timur. Dalam pengembangan unit usaha sembako menggunakan media sosial sebagai salah satu metode pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kalongan.

Adapun struktur organisasi BUMDes KMJ Desa Kalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Struktur Organisasi BUMDes Kalongan Mandiri Jaya

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Yarmuji A.Md	Komisaris
2.	Sigit	Direktur
3.	Riska Ummimul Khasanah	Sekretaris
4.	Diah Puspitosari	Bendahara
5.	Ali	Ketua Unit Usaha Pengelola Sampah
6.	Supendi	Ketua Unit Usaha Pariwisata
7.	Devi Ardiyani	Ketua Unit Usaha Sembako

Sumber : AD/ART BUMDes KMJ Tahun 2022

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya BUMDes KMJ sebagai berikut:

- a. Maksud dibentuknya BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menggerakkan perekonomian rakyat, membanyu dan mendorong percepatan pembangunan desa serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

- b. Tujuan dibentuknya BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan sebagai wadah usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

2. Pokdarwis Loka Jaya

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan mitra pemerintah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang wisata. Pokdarwis merupakan salah satu alternatif pengembangan pariwisata terkait dengan kampanye/promosi wisata. Di Desa Kalongan terdapat Pokdarwis Tedjo Asmoro yang ditetapkan melalui SK No. 430/07/VII/2017 pada tanggal 1Juli 2017 yang kemudian berganti nama menjadi Pokdarwis Loka Jaya pada tahun 2019. Berikut tabel susunan pengurus Pokdarwis Loka Jaya Tahun 2019.

Tabel 3. 8 Susunan Pengurus Pokdarwis Loka Jaya Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Yarmuji A. Md	Kepala Desa Kalongan	Pelindung
2.	Rohadi	Kepala Dusun Dampu	Penasehat
3.	Mukhtar Efendi	Tokoh Masyarakat	Ketua
4.	Harry Cahyoko	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
5.	Dewi Maesaroh	Tokoh Masyarakat	Sekretaris I
6.	Candra Dewi	Tokoh Masyarakat	Sekretaris II
7.	Ahmad Munaji	Tokoh Masyarakat	Bendahara I
8.	Dwi Pujianto	Tokoh Masyarakat	Bendahara II
9.	Suhaji	Tokoh Masyarakat	Seksi Teknis
10	Agus S.	Tokoh Masyarakat	Seksi Budaya dan Kesenian
11	Jazuli	Tokoh Masyarakat	Seksi Keamanan
12	Qoiri	Tokoh Masyarakat	Seksi Humas

13	Ahmad Munir	Tokoh Masyarakat	Seksi Media dan Publikasi
14	Rohani	Tokoh Masyarakat	Anggota
15	Zudi Afriyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
16	Daman Huri	Tokoh Masyarakat	Anggota
17	Puji Mulyani	Tokoh Masyarakat	Anggota
18	Isna Rahmawati	Tokoh Masyarakat	Anggota
19	Aria Nur	Tokoh Masyarakat	Anggota
20	Dony Arief Setyawan	Tokoh Masyarakat	Anggota

Sumber: AD/ART Pokdarwis Loka Jaya Tahun 2019

Gambar 3. 4 Logo Pokdarwis Loka Jaya

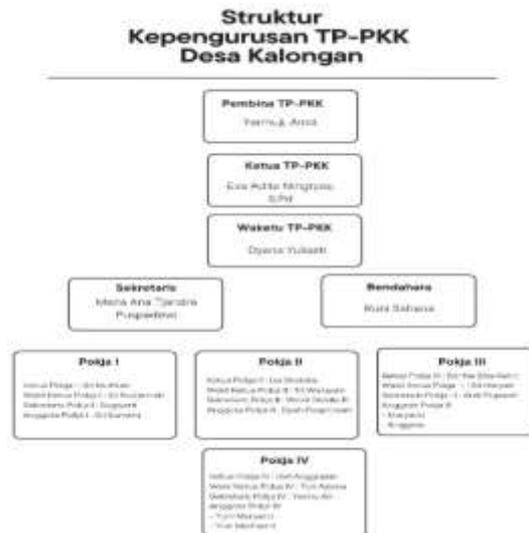


Sumber: AD/ART Pokdarwis Loka Jaya

3. TP-PKK Desa Kalongan

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan Wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga Desa Kalongan menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Adapun susunan kepengurusan TP-PKK Desa Kalongan sebagai berikut:

Gambar 3. 5 Struktur Kepengurusan TP-PKK Desa Kalongan



Sumber: Desa Kalongan 2022

4. Karang Taruna Desa Kalongan

Karang taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama menciptakan generasi muda di wilayah Desa Kalongan. Karang Taruna Desa Kalongan memiliki visi misi yaitu:

a. Visi

Karang Taruna Desa Kalongan merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kreatifitas menciptakan muda berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreatifitas. Kemampuan dibidang kesejahteraan sosial baik untuk masyarakat dilingkungan sekitar atau diwilayah lain.

b. Misi

- Meningkatkan SDM demi masa depan yang lebih baik melalui bidang masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak lain melalui pengembangan kelompok usaha bersama.
- Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi warga Desa Kalongan pada umumnya dan khususnya menciptakan pemuda yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai

pembangunan yang mampu mengatasi masalah sosial dilingkungannya.

- Melestarikan kesenian daerah serta pengembangan minat berolahraga.
- Meningkatkan peran pemuda dan perempuan serta memberikan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap hak perempuan sebagai anak atau remaja, sebagai istri dan ibu rumah tangga melalui sosialisasi pembangunan pemberdayaan perempuan yang melibatkan anggota karang taruna.
- Terwujudnya pemuda yang bertaqwa kepada Tuhan YME, penuh perhatian dan peka terhadap masalah dengan daya tahan fisik dan mental yang kuat, tegas dan teguh pendirian serta mampu berkreasi dan prestasi, sederhana sebagai acuan di masyarakat
- Turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan perilaku hidup sehat (PHBS) serta melakukan Upaya antisipatif dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Adapun susunan pengurus Karang Taruna Desa Kalongan adalah sebagai berikut:

- Ketua : Isnanto
- Wakil Ketua : Sugeng
- Sekretaris : Dewi Maesaroh, Latifah Monic
- Bendahara : Hayu R., Sholikin
- Divisi Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga:
 - 1) Agus Maryanto
 - 2) Tekad W.
 - 3) Megananda Harist Samudera
 - 4) Rohimin
 - 5) Ahmafari
- Divisi Ekonomi dan Kewirausahaan:
 - 1) Abdullah Akbar
 - 2) Nur Hidayah
 - 3) Novita Septiyana
 - 4) Ahmad Saroni

- Divisi Lingkungan hidup dan K3:
 - 1) Suwandi
 - 2) Yova P. Ariyandi
 - 3) Febri
 - 4) Juliyanto
- Divisi Humas dan Informasi:
 - 1) Mulyono
 - 2) Totok Isnanto
 - 3) Arief Mulya RA
 - 4) Bayu Purnawan
- Divisi Seni dan Budaya
 - 1) Muh Sahri
 - 2) Anggit M
 - 3) Armando Rosi Fauzi
 - 4) Mukhlas
 - 5) Agus Sugiyarto
 - 6) Iftak Haryanto

Gambar 3. 6 Logo Karang Taruna Desa Kalongan



Sumber: Desa Kalongan 2022

G. Jenis Objek Wisata di Desa Wisata Kalongan

Letak Desa Kalongan yang sangat strategis berada di perbukitan sangat berpotensi untuk dibangun destinasi wisata. Desa Wisata Kalongan memiliki beberapa destinasi wisata sebagai berikut:

1. Kayangan Tebing Alfath

Kayangan Tebing Alfath merupakan objek wisata yang beralamat di Dusun Tompo Gunung RT 05 RW 10 Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur. Kayangan Tebing Alfath merupakan objek wisata yang mengambil tema wisata sambil beramal, disebut dengan wisata amal karena seluruh penghasilan yang diperoleh dari penjualan tiket ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan Masjid Jami AlFatah. Objek wisata ini sangat menarik, sesuai dengan namanya yaitu Kayangan Tebing Alfath wisata ini berada diatas perbukitan dengan menyuguhkan pemandangan perkotaan, perkebunan, dan pegunungan.

Gambar 3. 7 Objek Wisata Kayangan Tebing Alfath



Sumber: <https://jatengtravelguide.info/detail/Mengajak-Anak-Berwisata-Sambil-Beramal-Hanya-di-Wisata-Amal-Kayangan-Tebing-Alfath>

Fasilitas-fasilitas yang ada di Kayangan Tebing Alfath sangat beragam, seperti beberapa spot foto, kolam renang untuk segala usia mulai dari anak-anak sampai dewasa, hingga wisata perahu air. Adapun tarif yang dikenakan yaitu HTM Rp. 10.000 dengan waktu operasi mulai dari pukul 08.00-17.00 WIB. Dalam hal ini, adanya wisata Kayangan Tebing Alfath merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat desa dibawah naungan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan.

2. Pasar Sawahan

Pasar Sawahan merupakan objek wisata yang memanfaatkan lahan persawahan yang berada di Dusun Kalongan, sepanjang jalan SMP N 5 Ungaran. Objek wisata Pasar Sawahan menyajikan beberapa stan yang menjual makanan tradisional hingga kerajinan tangan khas Desa Kalongan. Yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata ini adalah cara pembayaran yang dilakukan di Pasar Sawahan sangat unik, yaitu dengan menggunakan uli. Tidak hanya keindahan alam beserta jajanan dan produk unggulan desa yang disajikan, di Pasar Sawahan juga diselenggarakan pertunjukan kesenian tradisional seperti kuda lumping, drumblek, rebana dan beragam tari tradisional. Pasar Sawahan hanya dibuka di hari tertentu yaitu Minggu Pahing dan Minggu Legi dari jam 06.00-selesai. Adanya pembangunan objek wisata Pasar Sawahan ini merupakan hasil inisiatif dari Pokdarwis Lokajaya yang mengedepankan nilai-nilai tradisional masyarakat.

Gambar 3. 8 Pasar Sawahan



Sumber: <https://tribunjatengtravel.tribunnews.com/2020/03/15/pasar-sawahan-kalongan-kabupaten-semarang-jajanan-panganan-tradisional-di-tengah-sawah>

3. Curug Gendhing Asmoro

Curug Gendhing Asmoro merupakan objek wisata air terjun yang terletak di tengah hutan bambu yang lebat. Wisata ini berdiri pada tanggal 11 Februari 2018 yang disahkan langsung oleh wakil bupati pada saat itu yaitu Ngesti Nugraha. Menurut cerita yang beredar, Curug Gendhing Asmoro erat kaitannya dengan legenda tentang gamela gaib yang terletak didekat air terjun. Konon, pada masa lampau, setiap kali ada warga yang ingin mengadakan pertunjukkan wayang kulit, mereka dapat meminjam gamelan gaib tersebut dengan menjalani ritual khusus. Keesokan harinya, gamelan sudah muncul di lokasi tanpa sepengetahuan mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman cerita ini sudah jarang terdengar lagi. Pemerintah melalui BUMDes mengubah curug yang dulunya terkesan mistis menjadi objek wisata yang eksotis dan memanjakan mata. Pembangunan wisata ini

bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal masyarakat Desa Kalongan. Akan tetapi, dua tahun terakhir objek wisata Curug Gendhing Asmoro belum kembali beroperasi akibat Covid-19 dan sedang ditahap pengembangan dan revitalisasi oleh pemerintah setempat.

Gambar 3. 9 Curug Gendhing Asmoro



Sumber: <https://travel.kompas.com/read/2018/02/19/072400027/curug-gending-asmoro-eksotisme-air-terjun-di-tengah-hutan-bambu-2-?page=all>

4. Wisata Edukasi Jagad Domba

Jagad Domba merupakan objek wisata yang mengusung konsep wisata edukasi untuk pembibitan dan pemeliharaan hewan ternak domba. Wisata ini berlokasi di Desa Kalongan yang lokasinya cukup asri dan memiliki pemandangan perkebunan warga serta jauh dari pemukiman. Jagad domba resmi dibuka pada bulan Februari 2021 saat pandemi Covid-19 oleh seorang pengusaha peternakan di Desa Kalongan yang bekerja sama dengan BUMDes. Wisata edukasi ini tak hanya menyediakan edukasi peternakan domba, disana juga menjual pupuk kandang dan bulu domba yang dijual secara terpisah.

Gambar 3. 10 Objek Wisata Jagad Domba



Sumber: <https://jagad-domba-kalongan.business.site/>

BAB IV

PROSES PELIBATAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA

A. Perencanaan pembangunan Desa Wisata Kalongan dalam kerangka

Collaborative Governance

Proses penyusunan kebijakan pengembangan Desa Wisata Kalongan diawali dengan sebuah perencanaan yang melibatkan banyak aspek. Sebelum dikembangkannya desa wisata, Desa Kalongan sudah memiliki objek wisata, yaitu Curug Gendhing Asmoro yang dikelola oleh BUMDes, mengingat Desa Kalongan memiliki letak yang sangat strategis, yang berada pada perbukitan dengan potensi alam yang unggul sehingga hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengelola objek wisata. Akan tetapi tata kelola wisata masih bersifat individual dan belum terintegrasi dengan benar. Potensi wisata di Desa Kalongan hanya mengandalkan curug sebagai ikon pariwisata. Masih jarang kunjungan wisatawan yang datang karena belum ada branding yang kuat dalam mempromosikan wisata di Desa Kalongan.

Pemerintah Desa Kalongan merencanakan untuk membangun desa wisata dengan tujuan untuk mem-*branding* Desa Kalongan dari sisi wisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk memperkenalkan keindahan alam, tradisi dan budaya yang ada di Desa Kalongan kepada masyarakat luas. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Desa Kalongan diarahkan pada pengembangan pariwisata pada sektor andalan dan unggulan sebagai penghasil devisa, mendorong ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, dan mengembangkan usaha lokal masyarakat desa. Berikut penjelasan dari Kepala Desa Kalongan:

“Pembentukan desa wisata bermula dari gagasan saya yang saya tuangkan ke dalam visi misi, karena melihat potensi alam Desa Kalongan yang sangat melimpah kita mengajak jajaran pemerintah desa untuk menggali potensi-potensi Desa Kalongan untuk nantinya kita kembangkan menjadi desa wisata” (Wawancara, Bapak Yarmuji, 5 Mei 2023).

Untuk mengembangkan desa wisata, Pemerintah Desa Kalongan berencana untuk menggandeng pihak-pihak internal dan eksternal Pemerintah Desa Kalongan dalam penyusunan pengembangan Desa Wisata Kalongan yang kemudian disebut dengan *stakeholder*. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak bisa melakukan pembangunan desa wisata sendiri. Pembangunan desa wisata tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya peran aktor pengembangan desa wisata. Semakin tinggi peran aktor pengembangan desa wisata maka akan semakin besar kemungkinan keberhasilan sebuah desa wisata menjadi desa wisata yang maju dan berkembang (Pugra, 2021). Pemerintah desa sebagai inisiator awal dalam pembangunan desa wisata turut mengajak pihak swasta yang ada di desa, dalam hal ini pihak swasta yaitu pengusaha lokal desa yang memiliki integritas dan visi misi yang sama untuk membangun Desa Kalongan. Pengusaha lokal yang digandeng oleh pemerintah desa yaitu organisasi PPJMA sebagai pengelola objek wisata Kayangan Tebing Alfath, pengusaha ternak domba, pemilik sanggar budaya, dan pedagang-pedagang UMKM seperti rumah makan dan warug kecil-kecilan. Setelah dirasa sudah relevan, pemerintah Desa Kalongan mengundang pengusaha lokal dalam rangka membahas pengembangan Desa Wisata. Dengan begitu diharapkan komunikasi interaksi dan aktualisasi antar pemerintah desa dan pengusaha lokal bisa terjalin dan terorganisir dengan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Diharapkan dalam membahas kerjasama tersebut akan terjalin Kerjasama yang berkesinambungan. Berikut penjelasan dari Kepala Desa Kalongan:

“Pemerintah Desa Kalongan mengajak pihak swasta untuk bermitra dan menjadi bagian dari Desa Wisata Kalongan. pihak swasta yang bermitra bukan dari perusahaan melainkan pengusaha lokal yang mempunyai kemauan untuk bersama-sama membangun Desa Kalongan. Kita yakinkan kepada para pengusaha lokal bahwa dengan memasukkan usaha mereka kedalam Desa Wisata Kalongan akan meingkatkan dan mengembangka usaha mereka.” (Wawancara, Bapak Yarmuji, 5 Mei 2023)

Berdasarkan pemaparan diatas, swasta memiliki peran yang strategis dalam membantu mengembangkan Desa Wisata Kalongan karena dapat membantu pemerintan desa untuk memberikan ide konsep seperti apa desa wisata yang akan dikembangkan sekaligus mengurangi beban anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan wisata di Desa Kalongan. karena salah satu sumber utama dalam pengembangan dan pengadaan akomodasi wisata memerlukan anggaran yang besar.

Masyarakat Desa Kalongan juga dilibatkan dalam pengembangan desa wisata yaitu melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pemerintah Desa melakukan pendekatan dengan Pokdarwis yang diharapkan ikut serta berperan aktif dalam mengembangkan desa, karena Pokdarwis merupakan organisasi yang beranggotakan masyarakat yang memiliki kesadaran di bidang wisata yang sangat tinggi, sehingga diharapkan masyarakat ikut serta dalam fungsi kontrol agar kebijakan tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Masyarakat diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa dan swasta, karena dampak yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segi penghasilan secara ekonomi maupun aktivitas sosial yang ada di Desa Kalongan. Berikut penjelasan Sekretaris Desa Kalongan:

“Kita mengajak dan membuka seluas-luasnya masyarakat untuk berpartisipasi, karena pengembangan desa wisata ini juga untuk masyarakat maka kita lebih dorong masyarakat untuk menyalurkan ide mereka untuk konsep pengembangan desa wisata. Dalam hal ini Pak Kades mengencarkan sosialisasi pengembangan desa wisata kepada masyarakat melalui Rapat RT, RW, PKK, atau kumpulan Podarwis. Disetiap pertemuan itu Pak Kades menyelipkan gagasan pengembangan desa wisata dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat” (Wawancara, Bapak Fajar, 4 Mei, 2023).

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat desa sangat diharapkan terlibat dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan formal maupun informal. Dalam pertemuan ini rutin digencarkan Kepala Desa Kalongan untuk mengajak masyarakat membangun dan mengelola desa wisata agar mendorong semangat masyarakat untuk aktif berperan memajukan desa.

Pada kerangka kolaboratif yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash, disebutkan bahwa kondisi diatas sudah termasuk dalam model kerangka *Collaborative Governance*, yaitu dengan melihat aspek kondisi awal karena kondisi ini merupakan kondisi sebelum proses kolaborasi terjadi. Pemaparan diatas sudah mencakup kedalam variabel kondisi awal yang dijelaskan yaitu. Dapat dijelaskan bahwa pengembangan desa wisata di Desa Kalongan sangat menjanjikan dikarenakan sangat banyak potensi wisata yang dapat di manfaatkan dibandingkan dengan desa yang lainnya di Ungaran Timur. Dalam melakukan pengembangan desa wisata, pemerintah desa menggandeng *stakeholder* yaitu swasta dan masyarakat, bahkan Pemerintah Desa Kalongan menggandeng beberapa universitas seperti USM untuk membantu mendampingi terkait perumusan kebijakan dan sekaligus menjadi penengah disaat terjadi konflik antar *stakeholder*.

B. Pengambilan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan dalam kerangka *Collaborative Governance*

Dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan, upaya awal dalam pembuatan kebijakan pengembangan desa wisata yaitu dengan mendesain konsep desa wisata yang akan diusung dan pelibatan mitra-mitra oleh pengusaha lokal dan masyarakat, Pengambilan keputusan pengembangan desa wisata dilakukan melalui beberapa pertemuan tatap muka yang melibatkan setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Pada prinsipnya hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada setiap *stakeholder* untuk berbagi ide, menyelaraskan tujuan, dan saling memahami pandangan dalam kegiatan kolaborasi. Diharapkan bahwa melalui keterlibatan aktif dari seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor ini, egoisme organisasi dapat dihilangkan sehingga proses perumusan kebijakan kolaborasi dalam pengembangan desa wisata berjalan tanpa hambatan dari perbedaan organisasi.

Pemerintah Desa Kalongan melakukan perumusan kebijakan dengan melakukan pembagian tugas atau peran kepada masing-masing *stakeholder*. Tujuan dari diadakannya pembagian peran ini yaitu untuk mengakomodir tugas dan wewenang masing-masing *stakeholder* sesuai dengan kemampuan mereka. Berikut merupakan pembagian tugas dari masing-masing *stakeholder*.

**Tabel 4. 1 Peran masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan
Desa Wisata Kalongan**

NO.	ORGANISASI	KEWENANGAN	KEPENTINGAN
1.	Pemerintah Desa Kalongan	Bertanggung jawab pada saat perumusan, perencanaan, dan monitoring	Mengkoordinir dan memberikan arahan pada pihak swasta dan masyarakat
2.	Bapak Bambang (pengelola objek wisata Tebing Alfath), Bapak Erwan (Pemilik peternakan Jagad Domba), Ibu Ana Puspitasari (Pemilik Sanggar Budaya Condrowinoto)	Mitra-mitra yang tergabung dalam bagian dari Desa Wisata Kalongan dan fasilitator yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata	Pengusaha lokal yang ikut mempunyai visi misi untuk mengembangkan Desa Kalongan, dan penyedia sarana prasarana dalam pengembangan desa wisata.
3.	Pokdarwis Loka Jaya	Memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan	Organisasi yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan Desa Kalongan, aktif dalam hal wisata dan sebagai pelaku wisata

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dalam pengembangan desa wisata, peran pemerintah sebagai penanggung jawab yang merencanakan dan membuat kebijakan desa wisata, serta mengakomodir *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Peran dari swasta dalam hal ini adalah pengusaha lokal Desa Kalongan yaitu sebagai kemitraan yang bekerja sama dengan pemerintah desa, sebagai orang yang menuangkan ide-idenya untuk membangun desa wisata.

Sedangkan peran dari Pokdarwis yaitu sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu sebagai pelaku dari desa wisata yang memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan Desa Kalongan. Dari hasil pemaparan diatas, peran, wewenang, dan kapasitas kepentingan masing-masing *stakeholder* telah berjalan dengan jelas dalam beraksi, yang sangat membantu dalam proses kolaborasi. Dengan demikian, setiap aktor yang terlibat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik dalam pengembangan desa wisata. Tujuan dari pembuatan pemetaan tersebut adalah untuk mengurangi tumpang tindih kepentingan antar aktor dalam menjalankan program.

Pada penjelasan tersebut, kondisi diatas menunjukkan model kolaboratif yaitu desain kelembagaan, dimana Ansell dan Gash menjelaskan bahwa desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dan protokol dasar dalam berkolaborasi. Dalam pemaparan diatas, proses *Stakeholder* berkesempatan untuk berunding satu sama lain tentang hasil kebijakan, dilihat dari pemaparan diatas, *stakeholder* yang terlibat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat sehingga dapat menghasilkan kebijakan pembagian tugas dan wewenang masing-masing *stakeholder* dalam mengembangkan desa wisata. Hasil dari kebijakan tersebut yaitu pembagian tugas dan wewenang masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata.

C. Implementasi Kebijakan Desa Wisata Kalongan dalam Kerangka *Collaborative Governance*

Dalam berjalannya waktu, pihak desa sudah mempunyai tujuan terkait aturan yang mengatur hubungan kemitraan, dengan harapan kemudian akan dituangkan kedalam bentuk peraturan desa. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Kalongan belum memiliki regulasi yang mengatur alur berjalannya kegiatan kolaborasi, akan tetapi *stakeholder* sudah mengerti wewenang masing-masing peranan. Diharapkan semua elemen dapat terlibat dan berbagi peran sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan mengisi kekurangan satu sama lain.

1. Kepemimpinan dalam kolaborasi tata kelola pengembangan Desa Wisata Kalongan

Dalam tata kelola kolaborasi sangat dipengaruhi seorang pemimpin yang berkompeten. Pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang berintegritas, dapat mengakomodir semua kepentingan dan mengorganisir tiap-tiap pemimpin yang terlibat dalam berkolaborasi. Dalam pengembangan Desa

Wisata Kalongan, peran Kepala Desa Kalongan memiliki peran yang besar sebagai inisiator pertama yang menggerakkan Desa Wisata Kalongan sekaligus fasilitator antar *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan. Berikut penjelasan Sekretaris Desa Kalongan:

“Sejak awal rencana pembentukan Desa Wisata Kalongan ini merupakan gagasan Pak Kades yang ingin memperkenalkan Desa Kalongan dari segi wisata. Pak Kades juga turut melakukan diskusi-diskusi penggalian potensi alam bersama dengan jajaran perangkat desa. Selain itu, beliau memiliki sense of tourism yang sangat tinggi sehingga semangat itulah yang ditularkan kepada semua Masyarakat Desa Kalongan” (Wawancara, Bapak Fajar, 4 Mei 2023).

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Kalongan merupakan orang yang berperan secara aktif sebagai inisiator awal pengembangan desa wisata, sebagai fasilitator dan mediator, menggerakkan semua *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi secara keseluruhan. Power yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai pemimpin fasilitatif ini diturunkan kepada Pokdarwis Loka Jaya dalam bertanggung jawab atas Desa Wisata yang akan dikembangkan. Kepala Desa Kalongan memunyai dedikasi yang tinggi dalam proses pengembangan desa wisata, beliauah yang pertama kali memberikan gagasan untuk menjadikan Desa Kalongan sebagai Desa Wisata. Kepala Desa Kalongan juga memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan dari pengembangan Desa Wisata Kalongan karena beliauah yang turun langsung kedalam Masyarakat untuk meng-sosialisasikan program pengembangan desa wisata, dan melakukan kerjasama dengan mitra pengusaha lokal. Pada pemaparan diatas juga sesuai dengan model *Collaborative Governance* yaitu kepemimpinan fasilitatif, dimana kepala desa merupakan aktor yang menginisiasi awalnya pembangunan Desa Wisata. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa kepemimpinan hadir untuk memberdayakan dan mewakili pemangku kepentingan yang lemah. Dalam konteks ini, pemerintah desa menggandeng masyarakat dan pengusaha lokal untuk mewujudkan pembangunan desa wisata dan meyakinkan kepada masing-masing *stakeholder* bahwa dengan adanya desa wisata ini akan memberikan banyak manfaat kepada masing-masing *stakeholder*.

2. Proses Kolaborasi pelibatan *stakeholder* dalam mengembangkan Desa Wisata

Proses kolaborasi antar *stakeholder* dalam mengembangkan desa wisata dilakukan melalui berbagai tahap, tahapan yang pertama adalah dialog tatap muka antar *stakeholder*. Dialog tatap muka merupakan sarana pertemuan secara langsung dalam satu forum antar pemerintah desa dengan pengusaha lokal dan masyarakat Desa Kalongan. Pemerintah Desa melakukan dialog tata puka melalui forum musrenbangdes. Hal ini dilakukan untuk menyatukan visi dan misi agar sesuai dengan harapan dan visi misi Desa Kalongan untuk menjadikan desa yang unggul dari segi pariwisata. Pada forum ini membahas tentang lanjutan rencana pembangunan desa wisata. Pertemuan dilaksanakan di Balai Desa Kalongan dengan menghadirkan Dinas Pariwisata Kab. Semarang sebagai narasumber yang memberikan petunjuk dan pendampingan dalam pengembangan wisata di Desa Kalongan. Pada pertemuan ini dihadiri oleh jajaran perangkat desa, BUMDes, BPD, swasta dan perwakilan masyarakat. Berikut penjelasan dari sekretaris Desa Kalongan:

“Dalam pengembangan desa wisata, kita masukkan ke forum musrenbangdes. Kita pertemukan tokoh masyarakat, pengusaha lokal, kelompok masyarakat untuk kita gali seluas-luasnya aspirasi mereka untuk disinkronan dengan RPJMDes atau visi misi desa.” (Wawancara, Bapak Fajar 4 Mei 2023)

Gambar 4. 1 Musyawarah dengan *Stakeholder* Pengembang Desa Wisata



Sumber: Web Desa Kalongan

Hasil dari pembahasan ini yaitu untuk menentukan tujuan awal kolaborasi bersama dengan pengusaha lokal dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi wisata yang akan dikembangkan. Pembahasan ini juga membahas tentang tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder*. *Stakeholder* sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam pelaksanaannya. Pengembangan desa

wisata menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Kalongan dan seluruh elemen yang terlibat dalam proses kolaborasi. Dalam pembahasan ini, pengelolaan objek wisata akan dikelola dibawah naungan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan objek wisata di Desa Kalongan sudah berbadan hukum melalui naungn BUMDes Kalongan Mandiri Jaya. Jadi, setiap objek wisata dan unsur-unsur wisata yang terdapat di Desa Kalongan merupakan bagian dari usaha BUMDes Kalongan Mandiri Jaya.

Selain melakukan koordinasi melalui forum musyawarah desa, Kepala Desa aktif melakukan pertemuan dengan masyarakat secara aktif dalam kegiatan kumpul warga seperti Tahlilan, Mantu, Kumpulan PKK, Kumpulan Pokdarwis, Kumpulan RT/RW dan event-event penting yang dilaksanakan di Desa Kalongan. Hal ini dilakukan pemerintah desa untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dan menumbuhkan jiwa semangat dalam mengembangkan Desa Wisata Kalongan. Adapun penjelasan dari Sekretaris Desa Kalongan sebagai berikut:

“Pak Kades selalu aktif dalam menyampaikan sosialisasi pengembangan Desa Wisata Kalongan terhadap Masyarakat. Sosialisasi ini disampaikan dan diselipkan melalui forum-forum pertemuan antar masyarakat. Biasanya disampaikan oleh Pak Kades melalui Rapat RT, Kumpulan PKK, Mantu/Tahlil, atau sekedar bincang santai dengan Masyarakat”. (Wawancara, Bapak Fajar, 4 Mei 2023)

Gambar 4. 2 Musyawarah Kepala Desa dengan Pokdarwis



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kepala Desa juga aktif melakukan dialog tatap muka dengan Pokdarwis terutama pada Upaya pengembangan desa wisata Kalongan. Pada proses ini, kepala desa tiap bulan mengadakan pertemuan rutin bersama degan Pokdarwis yang membahas terkait saran dan masukan dari Masyarakat mengenai pengelolaan Desa Wisata Kalongan. Kegiatan ini rutin dilakukan akan tetapi tidak terjadwal

secara teratur. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ketua Pokdarwis sebagai berikut:

“Pak Kades selalu aktif mengajak anggota pokdarwis untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam mengelola dan memberikan konsep seperti apa desa wisata yang akan dibentuk. Pertemuan ini biasanya dilakukan di rumah Pak Kades, biasanya sih sebulan sekali tapi kadang juga enggak mesti”. (Wawancara, Bapak Mukhtar, 7 Mei 2023)

Menurut wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Kalongan aktif mengajak Pokdarwis dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata dengan mengencangkan program pengembangan desa wisata kedalam setiap pertemuan warga atau *event-event* tertentu di Desa Kalongan. Hal ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran penuh akan pentingnya memajukan desa dalam aspek pariwisatanya. Pokdarwis juga melakukan pertemuan dengan Masyarakat Desa Kalongan. Kegiatan ini seharusnya bisa dilakukan rutin dengan melibatkan masyarakat sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan pendapat.

Berdasarkan pemaparan diatas, proses dialog tatap muka pada kolaborasi ini muai berjalan sesuai proses *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dilihat pada beberapa kriteria yaitu pemerintah desa melakukan dialog tatap muka bersama *stakeholder* yaitu masyarakat melalui forum musyawarah desa dan acara perkumpulan masyarakat, yang melibatkan langsung seluruh *stakeholders* pengembang wisata. Pada tahap ini meskipun mulai berjalan tetapi masih perlu dilakukan secara konsisten.

Dalam menjalankan kolaborasi perlu dibangun kepercayaan dengan para *stakeholders*. Pemimpin kolaborasi harus membangun kepercayaan antara *stakeholders* pengembang wisata, karena membangun kepercayaan merupakan proses yang memakan waktu komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi (Ansell, 2008). Membangun kepercayaan merupakan hal terpenting dalam berkolaborasi, dalam hal ini Pemerintah Desa Kalongan membentuk kepercayaan dengan cara melakukan komunikasi yang intens kepada para *stakeholder* dalam hal ini masyarakat bahwa membangun Desa Wisata di Desa Kalongan akan membuahkan hasil yang nyata bagi para *stakeholders*, hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Kalongan sebagai berikut:

“Kita membangun kepercayaan terhadap para stakeholders dengan meyakinkan kepada mereka bahwa pengembangan Desa Wisata Kalongan akan membuahkan hasil yang baik, untuk langkah awal kita libatkan pengusaha lokal seperti Pak Bambang yang merupakan pengelola wisata Tebing Alfath, yang mana beliau sudah banyak berkecimpung dalam kemajuan pariwisata Desa Kalongan, kita juga mengajak Pak Erwan selaku pemilik ternak Jagad Domba, dan ibu Ana selaku pemilik Sanggar Budaya Condrowinoto. Kita libatkan juga masyarakat yaitu Pokdarwis, karena mereka-mereka lah yang memiliki pengalaman lebih banyak dibidang pariwisata sehingga dengan begitu rasa kepercayaan akan terbangun untuk berkolaborasi mengembangkan desa wisata”. (Wawancara, Bapak Yarmuji, 5 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, pemerintah Desa Kalongan sangat berharap dan menaruh kepercayaan penuh terhadap pihak swasta dan masyarakat, karena peranan *stakeholder* ini dinilai memiliki kapasitas yang tinggi dalam mengembangkan desa wisata dilihat dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pariwisata.

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antar *stakeholder*, akan tetapi pihak swasta dan masyarakat telah menyetujui kesepakatan yang dibahas dalam musyawarah desa terkait dengan pembagian tugas dan wewenang yang diberikan kepada tiap-tiap *stakeholder*. Dalam pembahasan tersebut juga membahas tentang perbaikan dan pengembangan infrastruktur penunjang wisata. Kemudian dari pihak masyarakat dan swasta mengikuti alur regulasi yang telah disepakati. Selain itu mereka juga ingin menggerakkan pemberdayaan lingkungan masyarakat Desa Kalongan. Berikut Wawancara dengan bapak Mukhtar selaku ketua Pokdarwis terkait kontribusi yang diberikan pokdarwis terkait pengembangan wisata Desa Kalongan:

“Dalam perumusan kebijakan konsep desa wisata, kita mengikuti saja bagaimana kesepakatan yang dibuat, yang terpenting kita melalui pokdarwis siap berkontribusi untuk mengembangkan desa wisata Kalongan”. (Bapak Mukhtar, 7 Mei 2023)

Dari hasil pemaparan ketua Pokdarwis Desa Kalongan, semua *stakeholder* menyetujui terkait rencana yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pemaparan diatas, penjelasan ini sesuai dengan kriteria *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008), dimana dalam proses ini memperlihatkan bagaimana

pemerintah desa memberikan kepercayaan kepada swasta dan pokdarwis untuk melakukan pengembangan desa wisata sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, begitu juga sebaliknya swasta dan pokdarwis mempercayakan penuh pemerintah desa untuk membuat regulasi kebijakan pengembangan desa wisata.

Komitmen merupakan unsur dari *Collaborative Governance*, dimana komitmen para pemangku kepentingan merupakan variabel terpenting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan terhadap suatu proses kolaborasi. Pemerintah Desa Kalongan memiliki komitmen untuk mengembangkan desa wisata dengan mengajak *stakeholder* yang terlibat untuk menjadi bagian dari unsur desa wisata. Berikut penjelasan dari Kepala Desa Kalongan:

“Kita memberikan wadah aspirasi untuk mereka melalui forum, setiap tahun kita libatkan masyarakat dan swasta dalam program desa. Misalnya di infrastruktur kita melibatkan BUMDes dan masyarakat turut serta dalam membangun infrastruktur, Untuk pembangunan non-fisik kita merayakan kegiatan Merti Dusun, dalam kegiatan ini melibatkan masyarakat untuk kepanitiaan. Sebisa mungkin masyarakat terlibat. Ketika di perencanaan masyarakat terlibat, di penganggaran mereka terlibat dalam BPD kemudian dalam pelaksanaan mereka terlibat dalam kepanitiaan bahkan dalam pelaporanpun mereka terlibat. Bisa dipastikan bahwa visi misi yang dibangun bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan realisasinya sesuai yang diinginkan.” (Wawancara, Bapak Yarmuji, 5 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, pemerintah desa memiliki komitmen yang tinggi terhadap *stakeholder* yang terlibat, dimana setiap forum dan kegiatan pengembangan desa *stakeholder* selalu dilibatkan dalam perencanaan hingga implementasinya. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah desa dalam mengupayakan pengembangan desa wisata. Adanya keseriusan tersebut menunjukkan komitmen untuk berproses dalam pengembangan desa wisata.

Pengusaha lokal memberikan komitmen mereka terhadap pengembangan desa wisata Kalongan, karena para pengusaha lokal di Desa Kalongan memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan Desa Kalongan. komitmen yang mereka berikan adalah keseriusan untuk terus mendukung perkembangan desa wisata. Bentuk komitmen yang diberikan pengusaha lokal yaitu dengan memasukkan objek wisata atau usaha

mereka ke dalam unsur desa wisata. Berikut penjelasan oleh Bapak Bambang, selaku pengelola objek wisata Kayangan Tebing Alfath:

“Kami sebagai pengelola wisata Kayangan Tebing Alfath memberikan komitmen kepada pengembangan desa wisata dengan mengikutkan objek wisata ke dalam salah satu unsur desa wisata Kalongan. Hal ini bertujuan agar wisatawan tertarik mengunjungi Desa Wisata Kalongan yang memiliki objek wisata yang beragam, selain itu objek wisata di Desa Kalongan milik pengusaha lokal juga dinaungi oleh BUMDes agar terarah dan terorganisir”. (Wawancara, Bapak Bambang, 21 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, swasta sudah memiliki komitmen dalam pengembangan desa wisata, selain memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan Desa Kalongan dalam sisi pariwisata, manfaat yang didapatkan yaitu secara tidak langsung usaha yang dikelola dipromosikan melalui desa wisata. Tidak hanya itu, pihak swasta juga berkomitmen untuk ikut memberikan ide dan konsep wisata Desa Kalongan dan siap membantu untuk memantau perkembangan desa wisata itu sendiri. Pemaparan diatas sudah menunjukkan bagaimana komitmen masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan. Komitmen tersebut menunjukkan bagaimana masing-masing *stakeholder* saling ketergantungan dan meningkatkan komitmen untuk melakukan kolaborasi. Implementasi dari kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* yaitu dengan memasukkan objek wisata Kayangan Tebing Alfath, Wisata Edukasi Jagad Domba, dan Pasar Sawahan ke dalam paket wisata Desa Wisata Kalongan. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, pengusaha lokal sebagai penyedia sarana dan prasarana serta Pokdarwis sebagai pelaksana desa wisata.

Dalam musyawarah yang dilakukan, pembahasan terakhir yaitu wacana pembangunan homestay sebagai penunjang fasilitas sarana prasarana desa wisata. Sesuai dengan komitmen pemerintah desa kepada Pokdarwis, pemerintah desa pembinaan kepada dan melakukan kegiatan studi banding ke Desa Wisata yang sudah maju dan berkembang, selain itu Pokdarwis juga diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan pengelolaan desa wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Semarang. Adapun penjelasan dari Kepala Desa Kalongan sebagai berikut:

“Kita mengajak teman-teman Pokdarwis untuk mengikuti kegiatan studi banding ke berbagai desa wisata yang sudah maju, seperti studi banding ke Pasar Papringan yang kita implementasikan ke dalam destinasi Pasar Sawahan, lalu studi banding ke Desa Ponggok untuk melihat dan mengetahui bagaimana cara Desa Ponggok menjadi desa mandiri melalui pariwisatanya. Beberapa kali Desa Kalongan diundang Dinas Pariwisata untuk datang mengikuti sosialisasi serta pelatihan homestay dan tourguide, untuk itu kit kirimkan perwakilan dari Pokdarwis agar mereka bisa mengimplementasikan hasil pelatihan mereka ke Desa Wisata Kalongan.” (Wawancara, Bapak Yarmuji, 5 Mei 2023).

Gambar 4. 3 Pelatihan Homestay yang diikuti oleh Pokdarwis Loka Jaya



Sumber: Web Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Bentuk komitmen yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata adalah perencanaan pemeliharaan dan Pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang wisata yang masih rusak dan belum lengkap. Pemerintah Desa memberikan komitmen untuk segera melakukan revitalisasi dan pemeliharaan destinasi wisata, namun hal tersebut belum terwujud sebab terkendala dana yang belum mencukupi untuk melakukan perbaikan, berikut penjelasan Direktur BUMDes, sebagai berikut:

“Saat ini Pemerintah Desa memiliki agenda yang akan dilaksanakan yaitu pembangunan infrastruktur yang ada pada tiap-tiap objek wisata. Pemerintah Desa berkkomitmen untuk segera memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas untuk menunjang wisatawan agar datang ke Desa Wisata Kalongan”. (Wawancara, Bapak Sigit 23 Mei 2023)

Gambar 4. 4 Kerja Bakti Pokdarwis dalam Merawat Lapak Pedagang di Pasar Sawahan



Sumber: Grup Pokdarwis Loka Jaya

Komitmen masing-masing *stakeholders* mengacu pada Kerjasama yang disepakati bersama. Akan tetapi peranan pengusaha lokal dinilai masih kurang dalam kontribusinya. Perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat segala aspek wisata di Desa Kalongan, agar menjadi Desa Wisata Kalongan yang maju dan berkembang. Selain kegiatan studi banding, Pemerintah Desa selalu mengundang para akademisi untuk membantu memetakan potensi-potensi pariwisata di Desa Kalongan dan melakukan sosialisasi dengan mengundang tokoh yang ahli di bidang pariwisata sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan, salah satunya adalah program kerja sama Desa Kalongan bersama mahasiswa Fakultas Teknik USM untuk memetakan potensi-potensi wisata di Desa Kalongan. Berikut penjelasan Kepala Desa Kalongan:

“Pemerintah Desa mengajak akademisi untuk ikut berkolaborasi dalam membangun Desa Wisata Kalongan, salah satunya adalah program Desa Binaan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik USM untuk mengembangkan Desa Wisata Kalongan melalui kajian-kajian ilmiah yang dilakukan.”
(Wawancara, Bapak Yarmuji, 5 Mei 2023)

Gambar 4. 5 Peta Persebaran Pariwisata Desa Kalongan Ungaran Timur



Sumber: Fakultas Teknik Universitas Semarang

Dapat disimpulkan dalam proses implementasi dalam mengembangkan desa wisata Kalongan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dituangkan dalam pembuatan paket wisata yang melibatkan pengusaha lokal dan pokdarwis. Akan tetapi dalam pemasarannya, pemerintah kurang melibatkan *stakeholder*. Dalam pengimplementasian desa wisata, peran utama masih dipegang pemerintah desa, karena pemerintah desa sebagai inisiator juga bertindak sebagai pelaku pariwisata. Pengusaha lokal dan pokdarwis mengikuti instruksi dari pemerintah desa. Dapat dikatakan bahwa dalam pengimplementasian pengembangan desa wisata masih bersifat elitis karena masih menggantungkan pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalannya kolaborasi.

BAB V

DAMPAK PELIBATAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KALONGAN

Dalam berbagai macam kolaborasi yang dilakukan memang nantinya akan berimplikasi kepada hasil dari tujuan yang diperoleh. Hasil dari proses kolaborasi diharapkan dapat membantu merubah kondisi sosial kemasyarakatan dalam segi ekonomi maupun tatanan sosial. Perubahan memang tidak selalu bersifat positif, akan tetapi dalam melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah Desa Kalongan, pihak swasta, dan masyarakat sudah melakukan yang terbaik untuk membangun desanya. Sehingga perubahan-perubahan kecil pun muncul.

a. Dampak pengelolaan desa wisata terhadap pengembangan Desa Wisata Kalongan

Pada proses pengelolaan yang dilakukan antar *stakeholder* masih bersifat elitis, hal ini dikarenakan proses pengembangan desa wisata masih banyak dikendalikan oleh pemerintah desa. Hal tersebut karena faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, serta peran pengusaha lokal yang mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga secara tidak langsung kolaborasi antar *stakeholder* belum berjalan secara mulus. Namun, komitmen antar *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata sudah cukup baik untuk mengelola objek-objek wisata yang ada di Desa Kalongan. Hasil dari kolaborasi antar pemerintah dengan *stakeholder* yang terlibat adalah terciptanya paket wisata. Paket wisata ini dibuat untuk memudahkan wisatawan dalam berkunjung ke Desa Wisata Kalongan.

Adapun tujuan dari penyediaan paket wisata yaitu agar memudahkan wisatawan untuk memilih paket wisata yang akan dikunjungi dan diikuti dalam paket tersebut. Adapun paket wisata yang ditawarkan di Desa Wisata Kalongan sebagai berikut:

a. Pasar Sawahan

Pasar Sawahan merupakan destinasi wisata yang dikembangkan oleh Pokdarwis Loka Jaya. Pasar Sawahan mengusung tema “kembali ke masa lalu”, yang artinya segala kegiatan jual beli serta isi dari pasar tersebut bersifat tradisional. Pasar Sawahan berdiri sejak tahun 2019 bersamaan dengan dibentuknya Pokdarwis Loka Jaya. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa Kalongan dalam pembangunan Pasar Sawahan yaitu dengan membentuk Pokdarwis dan melakukan pembinaan terhadap anggota Pokdarwis dalam bentuk mengadakan forum dan studi banding ke Desa Wisata yang sudah maju.

“Awalnya Pak Kades memberikan arahan kepada Pokdarwis untuk minimal membuat satu objek wisata yang bisa sedikit mengangkat ekonomi masyarakat Desa Kalongan. Untuk saat ini Pokdarwis masih fokus untuk mengembangkan Pasar Sawahan yang mengusung konsep tradisional”. (Wawancara, Bapak Mukhtar, 21 Mei 2023)

Selain mengusung konsep yang unik, Wisata Pasar Sawahan ini sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat Desa Kalongan karena para pedagang yang berjualan di Pasar Sawahan merupakan penduduk asli Desa Kalongan. Selain menawarkan keunikan akan suasana tradisional, Pasar Sawahan juga menunjukkan ragam budaya khas Jawa dengan menampilkan seni dan budaya Jawa. Pasar Sawahan sendiri dibangun tanpa menggunakan bantuan dana dari desa. Berikut penjelasan dari Ketua Pokdarwis Loka Jaya sebagai berikut:

“Pada awalnya sumber dana pembangunan Pasar Sawahan dari iuran para anggota Pokdarwis dan penyewaan lapak di Pasar Sawahan senilai Rp. 300.000,- lalu naik menjadi Rp. 500.000,- dengan benefit sewa lapak selamanya serta fasilitas perawatan dan pemeliharaan lapak. Untuk kolaborasi antar Pokdarwis dan Pemerintah Desa yaitu dengan bantuan bangunan joglo yang digunakan untuk pentas seni selama gelaran. Untuk kolaborasi dengan swasta hanya bersifat pedagang lokal desa belum ada investor di luar Desa Kalongan”. (Wawancara, Bapak Mukhtar, 21 Mei 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, pembentukan Pasar Sawahan tidak menggunakan Dana Desa, melainkan iuran masing-masing anggota Pokdarwis. Adapun bentuk kolaborasi dengan pemerintah yaitu pemberian bangunan joglo yang digunakan sebagai operasional Pasar Sawahan. Untuk pembagian hasil tidak ditentukan, karena Pokdarwis tidak diberi gaji. Penghasilan yang diperoleh dari

Pasar Sawahan yaitu dari uang sewa stand, pembelian tiket masuk Pasar Sawahan, dan parkir pengunjung. Pengusaha lokal yang terlibat dalam Pasar Sawahan yaitu pedagang yang menyewa stand untuk berjualan makanan tradisional atau kerajinan khas Desa Kalongan. Dalam hal ini pedagang merasakan peningkatan ekonomi yang signifikan. Berikut penjelasan dari pengusaha lokal yang terlibat dalam gelaran Pasar Sawahan:

“Semenjak adanya gelaran Pasar Sawahan, masyarakat yang tergabung dalam pedagang merasakan peningkatan ekonomi mbak. Karena Pasar Sawahan kan gelaran hanya 2kali dalam sebulan tapi antusias dari masyarakat desa dan wisatawan luar sangat luar biasa makannya saat gelaran sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar Desa Kalongan” (Wawancara, Ibu Murti, 21 Mei 2023).

Dapat disimpulkan bahwa Pasar Sawahan merupakan bagian dari paket wisata karena keunikannya yang memperlihatkan sisi tradisional masyarakat desa membuat wisatawan tertarik. pembangunan destinasi wisata ini merupakan program kerja dari Pemerintah Desa yang di pasrahkan pengembangannya kepada Pokdarwis, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan Pasar Sawahan.

b. Curug Gendhing Asmoro

Objek wisata Curug Gendhing Asmoro dibangun oleh Pemerintah Desa Kalongan saat belum menjadi desa wisata. Pembangunan Curug Gendhing Asmoro. Objek wisata Curug Gendhing terletak di Dusun Tompo Gunung berdekatan dengan destinasi wisata Kayangan Tebing Alfath. Pembangunan Curug Gendhing Asmoro dikelola oleh BUMDes Kalongan Mandiri Jaya dengan menggunakan 20% dari Dana Desa. Saat ini Curug Gendhing Asmoro sedang ditutup untuk umum karena sedang dilakukan tahap revitalisasi. Hal ini dilakukan karena beberapa infratstruktur yang ada di Curug Gendhing Asmoro rusak karena faktor alam. Berikut penjelasan mengenai program yang sedang dilakukan Pemerintah Desa yaitu perbaikan infrastruktur destinasi wisata Curug Gendhing Asmoro oleh Direktur BUMDes Kalongan Mandiri Jaya:

“Saat ini program Pemerintah Desa yaitu pemeliharaan tempat-tempat wisata yang dulunya tidak terawat dengan tujuan untuk meng-upgrade wisata supaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu program pemeliharaan infrastruktur wisata yaitu pembenahan jalan menuju Curug Gendhing Asmoro dan perbaikan aliran sumber air”.(Wawancara, Bapak Sigit, 23 Mei 2023).

Dapat disimpulkan bahwa Curug Gendhing Asmoro termasuk ke dalam paket wisata, namun untuk saat ini objek wisata Curug Gendhing Asmoro masih ditutup untuk wisatawan karena masih dalam tahap revitalisasi. Adapun pengelola Curug Gendhing Asmoro yaitu pemerintah desa sendiri melalui BUMDes. Keterlibatan *stakeholder* dapat dilihat dari pengusaha yang berjualan di lapak sekitar objek wisata dan masyarakat sebagai pelaku wisata yang turut mempromosikan objek wisata Curug Gendhing Asmoro melalui media sosial.

c. Kayangan Tebing Alfath

Wisata Kayangan Tebing Alfath merupakan destinasi wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh organisasi masjid Pengembangan Pemberdayaan Masjid Jami Al-Fata (PPMJA). Awalnya PPMJA mengelola lahan kosong bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan mengajukan izin kepada Pemda untuk pembangunan tanah bekas yang sudah tidak terpakai menjadi lokasi masjid baru. Setelah melalui persetujuan Bupati maka lahan kosong tersebut dihibahkan kepada Masjid Jami' Al-Fatah.

PPMJA melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Desa Kalongan yaitu memasukkan objek wisata Kayangan Tebing Alfath dalam pengembangan desa wisata serta mengedukasi masyarakat mengenai keinginan untuk menjadi Desa Mandiri yang dikenal dari sisi wisata. BUMDes juga merupakan Lembaga huku yang menaungi objek wisata Kayangan Tebing Alfath. Masyarakat dalam hal ini membantu mempromosikan wisata kedalam sosial media dan sebagai pelaku wisata.

d. Jagad Domba

Jagad Domba merupakan objek wisata yang mengusung konsep wisata edukasi untuk pembibitan dan pemeliharaan hewan ternak domba. Wisata ini berlokasi di Desa Kalongan yang lokasinya cukup asri dan memiliki pemandangan perkebunan warga serta jauh dari pemukiman. Jagad domba resmi dibuka pada bulan Februari 2021 saat pandemi Covid-19 oleh seorang pengusaha peternakan di Desa Kalongan yang bekerja sama dengan BUMDes. Wisata edukasi

ini tak hanya menyediakan edukasi peternakan domba, disana juga menjual pupuk kandang dan bulu domba yang dijual secara terpisah.

Bentuk kolaborasi dari pengusaha ternak domba dan pemerintah desa yaitu memasukkan peternakan domba bagian dari wisata edukasi ke dalam paket desa wisata. Target wisatawan objek wisata Jagad Domba yaitu siswa-siswa yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai edukasi bagaimana cara beternak domba dengan benar. Selain itu terdapat jual beli hewan domba untuk qurban, aqiqah, atau acara kantor.

Gambar 4. 6 Kegiatan Pembelajaran Luar Sekolah (PLS) Siswa SDN 1 Ungaran di Desa Wisata Kalongan



Sumber : Web Desa Kalongan

Berdasarkan pemaparan diatas, implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berjalan dengan lancar. Adapun kolaborasi yang dilakukan yaitu paket wisata yang dipromosikan ke dalam desa wisata yang ditawarkan. Konsep desa wisata yang ditawarkan yaitu unsur alam dan tradisi budaya yang diunggulkan Desa Kalongan. Sementara pembagian hasil dari masing-masing objek wisata masih di urusi oleh masing-masing pengelola wisata. Kolaborasi terjadi apabila terdapat wisatawan yang membeli paket wisata yang ditawarkan Desa Wisata Kalongan.

b. Dampak sosial dan ekonomi dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan

Pengembangan desa wisata pada dasarnya memberikan dampak perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Kolaborasi bisa gagal salah satunya karena ada dominasi dari institusi yang terlibat terutama dari pihak pemerintah desa yang cenderung menetapkan pola hubungan bertingkat terhadap *stakeholder* lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi kaku dan memiliki batasan dengan kondisi yang sudah ditetapkan pemerintah desa. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu diperhatikan dalam sebuah proses kolaboratif agar bagaimana hubungan antar pihak terlibat dapat bersifat sejajar untuk mengambil keputusan secara bersama.

Karena proses kolaborasi bersifat elitis, dan pengembangan desa wisata masih berjalan dengan sangat lamban karena belum tersedianya berbagai sarana prasarana yang dirasa masih kurang untuk menunjang perkembangan desa wisata, sehingga masyarakat belum merasakan pendapatan yang signifikan. Namun, dampak yang dirasakan masyarakat secara ekonomi dapat dikatakan ada perkembangan. Dampak yang dihasilkan yaitu meningkatnya daya beli terutama pada pengusaha setempat. Semenjak adanya Desa Wisata Kalongan, pengusaha UMKM dibidang kuliner khususnya mengalami pendapatan yang lumayan signifikan dikarenakan meningkatnya daya beli oleh wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Berikut wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM:

“Banyak perubahan, semenjak ada desa wisata di kalongan, des aini semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas, dan secara ekonomi dengan adanya desa wisata kalongan sedikit meningkatkan pedagang umkm walaupun penghasilan tidak menentu tergantung wisatawan yang datang.” (Wawancara, Ibu Murti, 21 Mei 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dijelaskan bahwa sudah ada penghasilan yang diperoleh dalam pengembangan wisata, semenjak dibentuknya paket wisata di Desa Wisata Kalongan, membuat banyak pengunjung yang datang dan membeli hasil olahan lokal penduduk desa, hal inilah yang membuat pendapatan masyarakat sedikit meningkat. Akan tetapi, peningkatan pendapatan hanya bersifat musiman sehingga pendapatan masyarakat pelaku wisata bersifat naik turun tergantung banyak-sedikitnya wisatwan yang datang.

Dari segi sosial dan budaya, dampak yang dirasakan dari adanya pengembangan desa wisata yaitu membuat masyarakat Desa Kalongan menjadi semakin guyub rukun karena secara tidak langsung mereka berkolaborasi untuk bagaimana membentuk dan mengelola Desa Wisata Kalongan dengan baik, sehingga menjadi desa yang unggul dan maju. Masyarakat juga menjadi sedikit peka terhadap pelestarian budaya lokal karena yang ditawarkan dari Desa Wisata ini salah satunya adalah kebudayaan dan adat istiadat masyarakat yang masih utuh terjaga.

Berdasarkan pemaparan diatas, dampak pelibatan *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata masih bersifat elitis, hal tersebut karena swasta dan masyarakat mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat juga dinilai kurang aktif seperti pengagasan ide konsep seperti apa desa wisata yang akan di munculkan. Akan tetapi, saat konsep desa wisata sudah terbentuk masyarakat dan swasta memiliki komitmen untuk mengembangkan desa wisata. Pada aspek pengelolaannya, banyak fasilitas yang harus diperbaiki dan dikembangkan untuk menunjang pengembangan desa wisata, terutama dalam pembuatan sarana prasarana yang menunjang desa wisata supaya menarik perhatian wisatawan untuk datang berkunjung.

Pada aspek ekonomi dan sosial, terdapat dampak perekonomian akan tetapi tidak terlalu signifikan. Hal tersebut karena sedikit banyaknya pendapatan ditentukan dengan sedikit atau banyaknya wisatawan yang hadir, sehingga tidak menentu pendapatan yang diperoleh, akan tetapi dalam aspek sosial budaya membuat masyarakat menjadi guyub dan saling membantu dalam melestarikan budaya lokal desa.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan dalam penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dalam proses pelibatan *stakeholder* pengembangan desa wisata dilakukan secara elitis, dimana peran pemerintah desa mendominasi dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan yaitu pengusaha lokal dan masyarakat. Kolaborasi dengan pengusaha lokal dan masyarakat dilakukan hanya pada batas perencanaan dan implementasi pengembangan desa wisata, sehingga dapat dikatakan kontribusi dari *stakeholder* pengembang wisata masih minimal.

Kedua, dampak proses kolaborasi belum banyak wisatawan yang berkunjung ke desa wisata karena belum lengkapnya sarana prasarana penunjang desa wisata. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak terlalu signifikan karena pendapatan yang diperoleh dinilai belum stabil tergantung banyak sedikitnya pengunjung yang datang. Dampak sosial dan budaya yang dirasakan yaitu masyarakat menjadi guyub dan saling gotong royong untuk melestarikan budaya lokal desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Z. (2019). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kepariwisata yang Berkelanjutan. *Conference on Public Administration and Society Vol 1 No 1*.
- Ali, K. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa, Vol. 14 No. 4*, 602-614.
- Ansell, C. d. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Vol 18 No 4*, 543-571.
- Aryani, S. W. (2017). Analisis Dampak Pembangunan Pariwisata Pada Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangharjo, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol 49 No 2*, 142-146.
- Chang, H. J. (2009). Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare In Korea. *International Review Of Publik Administration*, 76-77.
- Cresswell. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Ponggok). *JIEP Vol. 19 No. 2*, 120-127.
- Dewi, Y. N. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2*, 200-210.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
- Febrian, A. R. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana Vol II No 1*, 200-208.
- Gunawan, H. (2015). Perubahan Sosial Budaya masyarakat Desa Cihideung sebagai Desa Wisata. *Jurnal Sosieta Vol 5 No 2*.
- Kurniawan. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16-17.

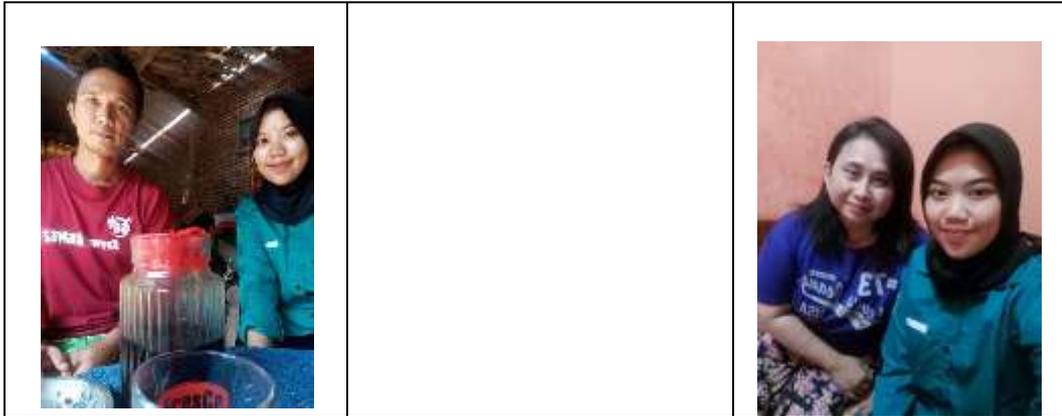
- Kusmayadi, R. R. (2020). Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Terhadap Kondisi Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Malang). *Jurnal Pusaka Vol 8 No 1*, 41-53.
- Mahadewi, N. P. (2017). Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kenderan, Gianyar, Bali. *Jurnal Analisis Pariwisata Vol. 17 No. 1*, 41-45.
- Muljadi. (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murdiyanto. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Probowinangun, Pakem, Sleman. *SEPA Vol 7 No 2*, 91-101.
- Nilamsari. (2014). Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana, Vol XIII No. 2*, 177-181.
- Nurhadryani, Y. (2022). Memahami Konsep E-Governance Serta Hubungannya Dengan E-Government dan E-Demokrasi. *SEMNASIF Vol 1 No 6*, 111-117.
- Pamungkas, D. I. (2015). Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi, dan Masyarakat. *Jurnal Teknik PWK Vol 4 No 3*, 361-372.
- Pugra, I. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green Tourism. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS Vol 7 No 2*, 111-120.
- Putra, T. R. (2013). Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota Vol 9 No 3*, 225-235.
- Risanti, F. (2014). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. *Jurnal Student UNY Vol 7 No 3*.
- Rosaliza. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya, Vol 11, No. 2*, 71-79.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi publik: teori dan aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM) :Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *JISPO Vol 9 No. 2*, 170-188.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Wisata. *Jurnal Sungkai*, 32-52.
- Suranny, L. E. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2.
- Syaifuddin. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata. *Publika Vol 10 No 2*, 17-30.
- Trisnawati, A. E. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan Vol 3 No 1*, 29-33.
- Wuri, J. (2015). Dampak Keberadaan Kampung Wisata Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. *Jurnal Penelitian Vol 18 No 2*, 143-156.
- Yani, A. (2021). Tata Kelola Desa Wisata di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi Vol. 4, No. 2*, 115-124.

LAMPIRAN

FOTO-FOTO KEGIATAN

<p>Wawancara Bersama Kepala Desa Kalongan</p> 	<p>Wawancara Bersama Ketua Pokdarwis Loka Jaya</p> 	<p>Wawancara Bersama Direktur BUMDes Kaongan Mandiri Jaya</p> 
<p>Wawancara Bersama Masyarakat</p> 	<p>Wawancara Bersama Pengelola Wisata Kayangan Tebing Alfath</p> 	<p>Wawancara Bersama Sekretaris Desa Kalongan</p> 
<p>Wawancara Bersama BPD Desa Kalongan</p>	<p>Foto Kegiatan Kunjungan ke Desa Wisata Kalongan</p> 	<p>Wawancara Bersama Pengurus Pokdarwis</p>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1236/Un.10.6/K/KM.05.01/05/2023 19 Mei 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Pemerintah Desa Kalongan
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Desa Wisata Studi Kasus Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Fauziah Noor Rahmani
NIM : 1906016005
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kab. Kudus, 27 April 2001
CP/e-mail : fauziarahma444@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Agus Basori/Istiafah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Punsae Blok D9/2 RT3/12 Desa Kalongan Kec.
Ungaran Timur

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan
Kasubag Akademik
[Signature]
S. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

CURRICULUM VITAE



Nama : Fauziah Noor Rahmani
TTL : Kab. Kudus, 27 April 2001
Alamat : Desa Kalongan, RT 003/012 Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang
NIM : 1906016005
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.66
Agama : Islam
E-mail : fauziarahma444@gmail.com
No. HP : 08816649298

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Perwanida
2. SDN Ungaran 02
3. SMP N 2 Ungaran
4. SMA N 2 Ungaran
5. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang